



Pemerintah Kota Tarakan

2025-2029



RENCANA STRATEGIS

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SERTA PERTANAHAN



dpkpp.tarakan@gmail.com

www.tarakankota.go.id/permkim/





RENSTRA

RENCANA STRATEGIS **DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN** **SERTA PERTANAHAN** **2025 - 2029**

PEMERINTAH KOTA TARAKAN
2025

Kata Pengantar

Alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur kami panjatkan ke kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan 2025 - 2029. Dokumen ini disusun dalam upaya melaksanakan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 1 ayat (7) dan pasal 7 menyatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis (Renstra).

Penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan 2025 – 2029 memiliki tujuan untuk menentukan arah dalam menetapkan strategi dan kebijakan bidang Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan, serta merumuskan program bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan selama 5 (lima) tahun kedepan sesuai dengan arah Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025 – 2029.

Semoga Renstra 2025 - 2029 ini dapat dilaksanakan secara optimal berhasil guna dan berdaya guna dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta dapat meningkatkan kinerja pembangunan Kota Tarakan.

Tarakan, 19 September 2025

Kepala,


Ir. H. EDY SUSANTO, M.Si
Pembina Utama Muda /IV c
NIP. 19660816 199803 1 005

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS.....	6
2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan.....	6
a. Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi	6
b. Sumber Daya	12
c. Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan	17
d. Kelompok Sasaran Layanan	46
e. Mitra Dinas dalam pemberian pelayanan	46
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan.....	48
a. Permasalahan	48
b. Isu Strategis	50
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	56
3.1 Tujuan Renstra Tahun 2025-2029	56
3.2 Sasaran Renstra Tahun 2025-2029	57
3.3 Strategi	60
3.4 Arah Kebijakan.....	62
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	66
4.1 Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan.....	Error! Bookmark not defined.
4.2 Uraian Subkegiatan Program Prioritas	109
4.3 Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029.....	118

4.4 Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2025-2029**Error! Bookmark not defined.**

BAB V PENUTUP	127
---------------------	-----

Daftar Tabel

Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur	13
Tabel 2. 2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan	13
Tabel 2. 3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan.....	14
Tabel 2. 4 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan.....	15
Tabel 2. 5 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin	15
Tabel 2. 6 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan.....	16
Tabel 2. 7 Sarana dan Prasarana	17
Tabel 2. 8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas	22
Tabel 2. 9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas	29
Tabel 2. 10 Capaian IKU, IKK dan SPM Tahun 2020-2024.....	39
Tabel 2. 11 Pemetaan Permasalahan dan Isu Strategis.....	53
Tabel 3 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas	59
Tabel 3 2 Strategi Dinas.....	61
Tabel 3 3 Arah Kebijakan.....	62
Tabel 4.1 Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Rencana Strategis	67
Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan Dan Pendanaan.....	82
Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	113
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)	122
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci (IKK)	123

Daftar Gambar

Gambar 2.1 Struktur Organisasi DPRKPP.....	7
--	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 1 ayat (7) dan pasal 7 menyatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra. Dokumen Renstra 2025-2029 Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025-2029. Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Tarakan yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Perumahan Rakyat dan Pertanahan sesuai Peraturan Wali Kota Tarakan No. 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan. Agar pelaksanaan tugas yang telah digariskan berjalan dengan efektif dan terarah, maka penyusunan dan penetapan Renstra OPD menjadi mutlak, yaitu sebagai pedoman dan panduan OPD dalam melaksanakan program, kegiatan dan Sub kegiatan setiap tahunnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun pada masa kepemimpinan Kepala Daerah terpilih.

Sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) untuk periode 2025–2029 wajib dilakukan secara serentak dengan RPJMD, sehingga terdapat sinergi yang kuat dengan RPJPN dan RPJMN 2025–2029. Instruksi ini merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025.

Secara khusus, Inmendagri tersebut menekankan beberapa poin penting:

- Kewajiban penyusunan RPJMD/Renstra dilakukan dalam jangka waktu maksimal enam bulan pasca pelantikan kepala daerah.
- Keselarasan dengan RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029, termasuk misi nasional (“Asta Cita”) harus menjadi acuan utama, diimbangi dengan mempertimbangkan potensi dan kearifan lokal.
- Penataan struktur Renstra PD menjadi lebih sederhana dan efisien, dari delapan bab menjadi lima bab, dengan pendekatan penyusunan yang lebih tematik, holistik, integratif, spasial (“THIS”), serta berbasis integrasi digital dan partisipatif masyarakat

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025–2029
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah
9. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2045, Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2024 Nomor 81;
10. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2029, Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2025 Nomor 84, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 45;
11. Peraturan Walikota Tarakan Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan;
12. Surat Keputusan Walikota Tarakan Nomor 100.3.3.3/HK-IV/202/2025 tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan disusun dalam kerangka Menindaklanjuti Inmendagri No 2 Tahun 2025, dengan maksud untuk memberikan arah strategis yang jelas, terukur, dan adaptif terhadap visi pembangunan daerah. Dokumen ini ditujukan untuk:

1. Menjawab kebutuhan peningkatan infrastruktur perumahan, permukiman, dan pertanahan yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.
2. Menjamin kesinambungan program dan kebijakan, terutama pasca periode kepemimpinan, sehingga pembangunan tidak sekadar bersifat jangka pendek.
3. Memberikan pedoman dalam pelaksanaan operasional Dinas agar lebih efisien, responsif, dan terintegrasi melalui pendekatan multi-arah dan terhubung dengan RPJMN.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan;
- 1.3. Maksud dan Tujuan;
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

- 2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan
 - a) Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas;
 - b) Sumberdaya;
 - c) Kinerja Pelayanan;
 - d) Kelompok Sasaran Layanan;
 - e) Mitra Dinas dalam pemberian pelayanan;
 - f) Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja.
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan
 - a) Permasalahan Pelayanan;
 - b) Isu Strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan Renstra Tahun 2025-2029;
- 3.2 Sasaran Renstra Tahun 2025-2029;
- 3.3 Strategi;

3.4 Arah Kebijakan.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1 Uraian Keterkaitan Program, Kegiatan, Subkegiatan;
- 4.2 Uraian Subkegiatan Program Prioritas;
- 4.3 Target IKU Tahun 2025-2029;
- 4.4 Target IKK Tahun 2025-2029.

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan

a. Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Tarakan Nomor 54 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan.

Tugas pokok Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan adalah membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

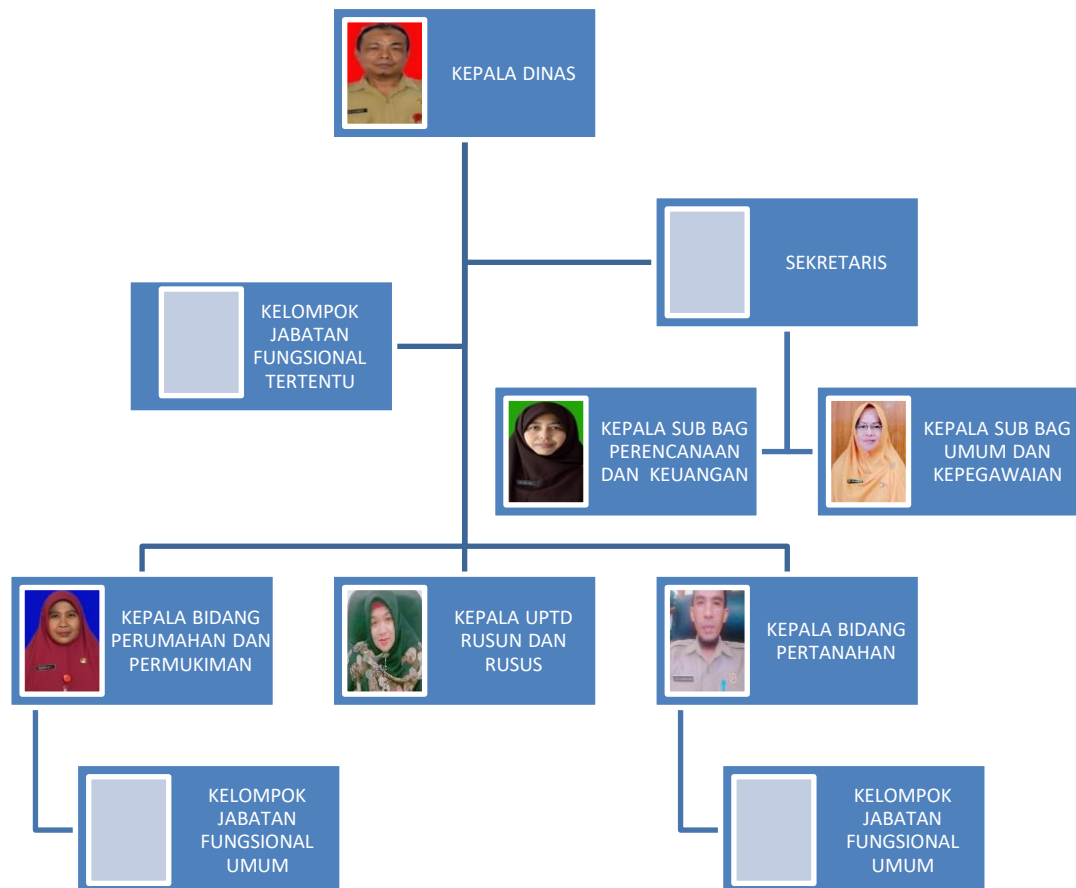
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan, menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan telah

dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
 1. Sekretariat, yang membawahkan:
 2. Sub bagian perencanaan dan keuangan; dan
 3. Sub bagian umum dan kepegawaian.
- b. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang membawahkan:
 - o Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Pertanahan, yang membawahkan:
 - o Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang terdiri dari :
 1. UPTD Rusunawa dan Rusus
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi

Uraian Tugas dan Fungsi :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam menyelenggarakan fungsi :

1. Koordinasi kegiatan Dinas;
2. Koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran Dinas;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan,

kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas;

4. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Dinas;
5. Koordinasi dan penyusunan produk hukum daerah pada Dinas;
6. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah di Dinas;
7. Pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
8. Penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Dinas; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Sekretaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bantu oleh:

2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

Sub bagian umum dan kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

Kepala sub bagian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretaris dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan, pengendalian, pengelolaan dan pemberian bimbingan di bidang administrasi umum, ketatalaksanaan, kehumasan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan, pengelolaan barang, kepegawaian, fasilitasi kegiatan analisis jabatan dan budaya kerja.

2.2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris mempunyai tugas menyusun perencanaan program anggaran rutin dinas, dan pengelola administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran,

pembukuan, pertanggung jawaban dan pelaporan keuangan.

3. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang perumahan, kawasan permukiman, prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan;
3. Pelaksanaan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana di daerah;
4. Pelaksanaan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah;
5. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
6. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban sertifikat kepemilikan bangunan gedung;
7. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh;

8. Pelaksanaan penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di Daerah;
9. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
4. Bidang Pertanahan

Bidang Pertanahan sebagaimana merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pertanahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pertanahan dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Bidang Pertanahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:

 1. Perumusan kebijakan di bidang penataan pertanahan, infrastruktur pertanahan, fasilitasi pengadaan tanah dan hubungan hukum pertanahan, dan penanganan masalah pertanahan;
 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penataan pertanahan, infrastruktur pertanahan,fasilitasi pengadaan tanah dan hubungan hukum pertanahan, dan penanganan masalah pertanahan;
 3. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban izin lokasi dalam 1 (satu) Daerah.
 4. Pelaksanaan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong di Daerah;
 5. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban izin membuka tanah;
 6. Pelaksanaan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah;

7. Pelaksanaan fasilitasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah;
 8. Pelaksanaan penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee* dalam Daerah;
 9. Pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah garapan di Daerah;
 10. Pelaksanaan penyelesaian masalah tanah kosong di Daerah;
 11. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penataan pertanahan, infrastruktur pertanahan, fasilitasi pengadaan tanah dan hubungan hukum pertanahan, dan penanganan masalah pertanahan; dan
 12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
5. Kelompok Jabatan Fungsional
- Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dimiliki dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas. Jabatan Fungsional Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan adalah sbb:
6. Kepala UPTD RUSUNAWA dan RUSUS
- Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa dilakukan untuk mendukung program pemerintah pusat terkait masalah pembebasan kawasan kumuh yang berada di perkotaan dan Kota Tarakan masuk dalam program tersebut. Rumah Susun Sederhana Sewa di Kota Tarakan merupakan hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) kepada Pemerintah Kota Tarakan, tepatnya pada tanggal 4 September 2016.

b. Sumber Daya

b.1. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan, Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia ada 40 Pegawai, adapun rincian pegawai per jenis kelamin dan tingkat pendidikan selengkapnya disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

NO	Unit Kerja	Umur (Tahun)					Jumlah
		31-35	36-40	41-45	46-50	51-60	
1	Bidang Sekretariat		1	3	1	6	11
2	Bidang Perumahan	1		1		2	4
3	Bidang Permukiman			1	6	3	10
4	Bidang Pertanahan		1	1	3	5	10
5	UPTD Rusunawa		1		2	2	5
	TOTAL	1	3	6	12	18	40

Sumber: Sub Bagian Umum Kepegawaian DPRKPP

Komposisi pegawai menunjukkan Kelompok usia 51–60 tahun mendominasi (18 orang = 45%) yang signifikan. Tanpa rekrutmen dan pengembangan pegawai muda, dalam 5–10 tahun ke depan dapat terjadi penurunan kinerja layanan publik, terutama di bidang teknis dan operasional. Upaya regenerasi, transfer pengetahuan, dan perencanaan formasi menjadi prioritas agar kontinuitas pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan tetap terjaga.

Tabel 2. 2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan

NO	Unit Kerja	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Bidang Sekretariat			8	3	11
2	Bidang Perumahan			2	1	3
3	Bidang Permukiman		2	7	2	11
4	Bidang Pertanahan		1	8	1	10
5	UPTD Rusunawa		2	3		5
	TOTAL	0	5	28	7	40

Sumber: Sub Bagian Umum Kepegawaian DPRKPP

Struktur Golongan III: 28 pegawai (70%) → mayoritas pegawai berada pada level staf/penyelia. Golongan IV: 7 pegawai (17,5%) → posisi struktural/pimpinan, relatif sedikit. Golongan II: 5 pegawai

(12,5%) → level pelaksana dasar. Golongan I: Tidak ada pegawai (0%), artinya tidak ada tenaga kerja level sangat dasar. Struktur golongan pegawai didominasi Golongan III, menunjukkan Sumber Daya Manusia (SDM) berpengalaman namun minim pimpinan (Gol. IV) dan tanpa tenaga dasar (Gol. I). Untuk menjaga efektivitas pelayanan dan kesinambungan organisasi, perlu perencanaan formasi SDM baru, pengembangan karier internal, dan penguatan jenjang struktural terutama di UPTD Rusunawa dan Bidang Perumahan dan Permukiman.

Tabel 2. 3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

NO	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		I	II	III			IV	
		SD	SMP	SMA/SMK	D3	S1	S2	
1	Bidang Sekretariat			1	2	5	3	11
2	Bidang Perumahan					5	1	6
3	Bidang Permukiman			5		2	1	8
4	Bidang Pertanahan			2		6	2	10
5	UPTD Rusunawa			4		1		5
	TOTAL	0	0	12	2	19	7	40

Sumber: Sub Bagian Umum Kepegawaian DPRKPP

Komposisi pendidikan pegawai cukup baik (65% S1/S2), namun masih ada 30% pegawai SMA/SMK yang terkonsentrasi di Bidang Permukiman dan UPTD Rusunawa. Untuk menjaga kualitas pelayanan dan mendorong inovasi, perlu peningkatan kapasitas pegawai menengah, distribusi mentor dari unit berpendidikan tinggi, serta rekrutmen baru dengan kualifikasi lebih tinggi. Ini akan memperkuat kompetensi teknis dan kesiapan menghadapi tuntutan kerja masa depan.

Struktur jabatan didominasi Fungsional Pelaksana (57,5%), dengan proporsi pejabat struktural (Eselon II–IV) sekitar 32,5%, dan Fungsional Tertentu relatif sedikit (10%). Untuk mendukung visi peningkatan layanan hunian dan pengelolaan permukiman, perlu penguatan jabatan fungsional teknis, pengembangan kompetensi staf, serta perencanaan suksesi agar kesinambungan kepemimpinan dan

kualitas layanan tetap terjaga. Komposisi Pegawai menurut Jabatan ada pada Tabel 2.4 dibawah ini.

Tabel 2. 4 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

No	Unit Kerja	Jabatan
1	Eselon II	1
2	Eselon III	3
3	Eselon IV	6
4	Fungsional Tertentu	4
5	Fungsional Pelaksana (Staf)	23
	TOTAL	40

Sumber: Sub Bagian Umum Kepegawaian DPRKPP

Tabel 2. 5 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

NO	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Bidang Sekretariat	8	2	10
2	Bidang Perumahan	2	2	4
3	Bidang Permukiman		11	11
4	Bidang Pertanahan	1	8	9
5	UPTD Rusunawa	2	3	5
	TOTAL	12	28	40

Sumber: Sub Bagian Umum Kepegawaian DPRKPP

Struktur pegawai masih didominasi laki-laki (70%), terutama di Bidang Perumahan dan Permukiman dan Bidang Pertanahan (90% laki-laki). Sekretariat dan Perumahan menunjukkan komposisi lebih seimbang. Untuk memastikan layanan lebih inklusif dan responsif, perlu rekrutmen yang memperhatikan kesetaraan gender, pengembangan kompetensi teknis bagi pegawai perempuan, dan internalisasi perspektif gender dalam perencanaan dan pelaksanaan program dinas.

Tabel 2. 6 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

NO	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Eselon II		1	1
2	Eselon III	1	2	3
3	Eselon IV	4	5	9
	TOTAL	5	8	13

Sumber: Sub Bagian Umum Kepegawaian DPRKPP

Berdasarkan data tabel-tabel diatas, dengan jumlah Pegawai sebanyak 40 orang dengan komposisi tingkat Pendidikan yang cukup baik, dan Tenaga Honorer sebanyak 15 orang maka diharapkan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara optimal serta menjalankan perannya sebagai pengampu urusan Perumahan Rakyat dan Pertanahan serta urusan Penataan Pertanahan dengan baik.

b. 2. Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan menunjukkan kecenderungan penurunan, terutama pada AC, Laptop, Printer, dan Mobil. Barang yang paling bermasalah adalah Kursi (70% baik tanpa perbaikan empat tahun berturut-turut). Dengan pemeliharaan berkala dan pengadaan bertahap yang terencana, kualitas sarana kerja dapat ditingkatkan sehingga menunjang produktivitas dan kenyamanan pegawai, selengkapnya disajikan pada tabel 2.7 dibawah ini.

Tabel 2. 7 Sarana dan Prasarana

NO	NAMA BARANG	JUMLAH (UNIT)	KONDISI BAIK (%) TAHUN			
			2020	2021	2022	2023
1	AC	13		38%	30%	23%
2	P.C. UNIT	14	100%	100%	100%	100%
3	LAPTOP	7	100%	100%	85,71%	71,42%
4	PRINTER	12	100%	100%	91%	83,33%
5	MOBIL	5	80%	80%	80%	60%
6	SEPEDA MOTOR	12	91,66%	83,33%	83,33%	83,33%
7	MEJA KERJA	60	91%	91%	91%	91%
8	MEJA PEJABAT	2	100%	100%	100%	100%
9	KURSI	90	70%	70%	70%	70%
10	KURSI SANDARAN RENDAH	6	100%	100%	83,33%	83,33%
11	KURSI SANDARAN TINGGI	2	100%	100%	100%	100%

c. Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan

Pelaksanaan Renstra Tahun 2020–2024 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Tarakan secara umum telah menunjukkan capaian yang positif. Sebagian besar indikator kinerja tujuan, sasaran, program, dan kegiatan dapat dicapai bahkan melampaui target. Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang mengalami fluktuasi atau belum stabil pencapaiannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program pembangunan perumahan, kawasan permukiman, PSU, serta administrasi pertanahan telah berjalan, tetapi tetap memerlukan penguatan tata kelola, konsistensi implementasi, serta dukungan lintas sektor. Analisa rasio capaian kinerja sebagai berikut:

1. Capaian Sasaran Renstra

1. Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Indikator kinerja ini menunjukkan capaian yang relatif stabil dan konsisten tinggi. Persentase rumah MBR yang terbangun maupun direnovasi melampaui target hampir di setiap tahun, dengan capaian tertinggi pada 2021 (128,35%). Program pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana maupun relokasi juga menunjukkan capaian nyaris sempurna (99–100% setiap tahun).

Pada aspek pengelolaan rumah susun (rusunawa), rasio capaian penghunian unit kamar mengalami dinamika. Tahun 2021–2022 relatif stagnan di angka 40%, namun pada 2023 melonjak hingga 150% yang menunjukkan adanya peningkatan hunian pasca intervensi program atau kebijakan tarif. Walaupun demikian, pada 2024 capaian kembali menurun, sehingga ke depan diperlukan kebijakan pengelolaan rusunawa yang lebih profesional, berkelanjutan, dan berpihak pada MBR.

2. Menurunnya Luas Kawasan Kumuh

Indikator penurunan kawasan kumuh merupakan salah satu yang paling menantang. Target Renstra cukup ambisius, yaitu menurunkan luas kumuh dari 47,33% pada 2020 menjadi 6,87% di 2024. Namun, capaian lapangan cenderung fluktuatif. Pada 2020, realisasi cukup baik (42,44%), tetapi pada 2022 rasio kembali menurun di 65,31%. Pada 2023 capaian membaik melampaui target (101,19%), namun kembali turun pada 2024 (63,61%).

Subkegiatan penataan kawasan kumuh di bawah 10 hektar menunjukkan capaian yang sangat bervariasi. Beberapa capaian bahkan mencapai lebih dari 200% dari target (contohnya 2022 dan 2024), yang menunjukkan efektivitas program di wilayah tertentu. Namun demikian, ketidakstabilan capaian antar tahun menandakan adanya masalah dalam konsistensi implementasi program. Faktor yang memengaruhi antara lain keterbatasan lahan, resistensi masyarakat terhadap relokasi, serta kurangnya

sinergi lintas sektor (sanitasi, air minum, sosial, dan ekonomi), serta belum matangnya penentuan target awal renstra.

3. Meningkatnya Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Didukung PSU.

Indikator persentase PSU yang ditingkatkan menunjukkan capaian yang relatif baik dan stabil. Sejak 2021 hingga 2024, realisasi berada pada kisaran 83–100%. Hal ini menggambarkan bahwa penyediaan prasarana jalan lingkungan, serta utilitas pendukung kawasan permukiman telah berjalan sesuai target.

4. Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan dalam Pembangunan

Aspek pertanahan merupakan salah satu tantangan utama. Penyelesaian sengketa tanah menunjukkan capaian yang sangat fluktuatif. Pada 2020 capaian bahkan melampaui target (163,62%), namun pada 2023 hanya mencapai 33,33%. Hal ini menggambarkan bahwa penyelesaian konflik pertanahan sangat dipengaruhi oleh kompleksitas kasus di lapangan, kapasitas mediasi, serta koordinasi dengan BPN dan aparat hukum.

Indikator ganti rugi dan santunan tanah juga mengalami dinamika, dari capaian rendah di 2020 (45,94%) hingga meningkat stabil di atas 85% pada 2022–2024. Sementara itu, tindak lanjut dokumen Surat Penggunaan Lahan (SPL) relatif stabil tinggi, dengan capaian konsisten $\geq 97\%$ sejak 2021. Kondisi ini menunjukkan bahwa administrasi teknis berjalan baik, namun aspek resolusi konflik pertanahan masih menghadapi hambatan besar.

5. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan (SAKIP)

Indikator nilai SAKIP menunjukkan tren positif dan meningkat. Target Renstra ditetapkan pada level “B” dengan skor 64, namun realisasi sejak 2020 hingga 2023 selalu melampaui target, bahkan mencapai predikat “BB” dengan skor 77,28 pada 2023. Rasio capaian terhadap target berada pada kisaran 115–125%.

Pada sisi layanan penunjang perangkat daerah, sebagian besar indikator tercapai penuh (100%), seperti administrasi keuangan dan perencanaan. Namun, terdapat beberapa indikator yang belum konsisten, seperti layanan kepegawaian dan jasa penunjang yang hanya tercapai 0–67%. Sebaliknya, pemeliharaan barang milik daerah justru menunjukkan over-achievement hingga 220%, menandakan adanya peningkatan kapasitas pada aspek pengelolaan aset.

2. Capaian umum

Dari uraian capaian di atas, dapat ditarik beberapa pola umum:

1. Program rumah layak huni, termasuk penanganan rumah korban bencana dan relokasi, berhasil dan konsisten mencapai target.
2. Penanganan kawasan kumuh masih menjadi tantangan utama karena capaian sangat fluktuatif antar tahun.
3. Penyediaan dan peningkatan PSU relatif stabil, meskipun ada gap pada awal periode.
4. Administrasi pertanahan masih menghadapi kendala serius dalam penyelesaian sengketa, walaupun administrasi teknis (SPL) relatif baik.
5. Akuntabilitas kinerja (SAKIP) menunjukkan perbaikan signifikan, menandakan peningkatan tata kelola dan sistem akuntabilitas di perangkat daerah.

3. Rencana Langkah Perbaikan

Berdasarkan hasil evaluasi, beberapa langkah perbaikan yang perlu menjadi perhatian pada periode perencanaan berikutnya adalah:

1. Penguatan Integrasi Program Penanganan Kawasan Kumuh
 - Melalui sinergi lintas sektor perumahan, PSU, air minum, sanitasi, dan pemberdayaan masyarakat.
 - Fokus pada kawasan prioritas dengan pendekatan berbasis masyarakat.
2. Perbaikan Tata Kelola Administrasi Pertanahan
 - Peningkatan kapasitas mediasi dan koordinasi dengan BPN, aparat hukum, serta lembaga adat.

- Penyusunan regulasi yang lebih jelas terkait penyelesaian sengketa dan kompensasi lahan.
- 3. Profesionalisasi Pengelolaan Rusunawa
 - Penetapan regulasi tarif yang berkeadilan.
 - Penyediaan fasilitas sosial ekonomi untuk penghuni.
 - Sistem pengelolaan berbasis Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) atau kerja sama pengelolaan.
- 4. Konsistensi Layanan Administrasi Penunjang
 - Perencanaan, kepegawaian, dan jasa penunjang perlu dipastikan berjalan konsisten tiap tahun, bukan parsial.
 - Penguatan digitalisasi layanan penunjang.
- 5. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Inovasi
 - Melanjutkan tren positif SAKIP dari “BB” menuju “A”
 - Mengintegrasikan sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan dengan indikator yang lebih *outcome-oriented*.
 - Mendorong inovasi pelayanan publik yang mendukung peningkatan kualitas perumahan dan permukiman.

Kinerja pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan berdasarkan Renstra Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.8 di bawah ini:

Tabel 2. 8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas

Tujua n	Sasara n	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota Tahun					Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Pelayanan Infrastruktur Lingkungan yang Merata dan Berkualitas dalam Mencapai Tujuan Pembangunan Kota Tarakan				Cakupan Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Administrasi Pertanahan	NA%	100%	100%	100%	100%		101,8%	78,92%	100%	99,79%		101,80 %	78,92%	100%	99,79%
	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni untuk MBR			Persentase Rumah untuk MBR yang terbangun dan terenovasi	20%	40%	60%	80%	100%	21,40%	51,34%	66,52%	88,96%	98,17%	106,99 %	128,35 %	110,87 %	111,20 %	98,17%
		1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase ketersediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana / relokasi	100%	100%	100%	100%	100%	99,75%	100%	100%	100%	100%	99,75%	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
		1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Cakupan rumah korban bencana yang dibangun dan/atau direhab	NA %	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%		100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
		1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase penghunian rumah khusus	NA %	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%		100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
		1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan	Persentase penghunian	NA %	33,84%	38,38%	40,91%	43,43%		41,92%	40,91%	40,91%	65,15%		123,87 %	106,59 %	100,00 %	150,01 %

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota Tahun					Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
			Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	unit kamar rusunawa															
		1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase layanan ketersediaan rumah layak huni untuk MBR	20%	40%	60%	80%	100%	21,398 %	51,34%	66,52%	88,96%	98,17%	106,99 %	128,35 %	110,87 %	111,20 %	98,17%
		1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah RTLH yang terfasilitasi	NA Unit	250 Unit	250 Unit	250 Unit	250 Unit		200 Unit	270 Unit	250 Unit	122 Unit		80,00%	108,00 %	100,00 %	48,80%
	Menurunnya luas kawasan kumuh			Persentase lingkungan permukiman kumuh	47,33%	49,17%	31,74%	17,64%	6,87%	42,44%	49,17%	42,75%	17,43%	9,37%	89,67%	100,00 %	65,31%	101,19 %	63,61%
		1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase lingkungan permukiman kumuh	47,33%	49,17%	31,74%	17,64%	6,87%	42,44%	49,17%	42,75%	17,43%	9,37%	89,67%	100,00 %	65,31%	101,19 %	63,61%
		1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase ijin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang diterbitkan	NA %	NA %	100%	100%	100%			100%	100%			100,00 %	100,00 %		0,00%

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota Tahun					Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
		1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	persentase kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha yang tertata	NA %	NA %	25,00%	50%	75%			24,03%	50%	46,25%			96,12%	100,00 %	61,67%
		1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah luasan kumuh dibawah 10 Ha yang tertangani (Ha)	NA Ha	4,11 Ha	5,34 Ha	7,45 Ha	4,42 Ha		4,11 Ha	13,36 Ha	7,45 Ha	10,48 Ha		100,00 %	250,19 %	100,00 %	237,10 %
	Meningkatnya lingkungan perumahan dan permukiman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)			Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang ditingkatkan	NA %	100%	100%	100%	100%		83,33%	100,00%	98,67%	100%		83,33%	100,00 %	98,67%	100,00 %
		1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang ditingkatkan	NA %	100%	100%	100%	100%	0,00%	83,33%	100,00%	98,67%	100%	0,00%	83,33%	100,00 %	98,67%	100,00 %
		1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Panjang Jalan Lingkungan yang dibangun	NA %	100%	100%	100%	100%		83,33%	100,00%	98,67%	100%		83,33%	100,00 %	98,67%	100,00 %
	Meningkatnya tertib administrasi pertanahan dalam pembangunan			Persentase konflik/sengketa tanah yang terselesaikan	50%	100%	100%	100%	100%	81,81%	96,77%	50,00%	33,33%	100%	163,62 %	96,77%	50,00%	33,33%	100,00 %
				Persentase ganti kerugian	94,60%	0%	100%	100%	100%	43,46%	0%	100%	85,71%	100%	45,94%		100,00 %	85,71%	100,00 %

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota Tahun					Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
				dan/atau santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan															
				Persentase dokumen SPL yang ditindaklanjuti	11%	100%	100%	100%	100%	13,69%	97,44%	100%	100,00%	100%	124,45 %	97,44%	100,00 %	100,00 %	100,00 %
		2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100%	100%	100%	100%	100%	62,73%	-	50,00%	33,33%	100%	62,73%	0,00%	50,00%	33,33%	100,00 %
		2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyelesaian sengketa tanah garapan	NA %	100%	100%	100%	100%		-	50,00%	33,33%	100%		0,00%	50,00%	33,33%	100,00 %
		2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase ganti kerugian dan/atau santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan	100%	0%	100%	100%	100%	0%	-	100%	85,71%	100%	0,00%		100,00 %	85,71%	100,00 %
		2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Persentase penerima ganti kerugian dan santunan tanah yang terselesaikan	NA %	NA %	100%	100%	100%			100%	85,71%	100%			100,00 %	85,71%	100,00 %

Tujua n	Sasara n	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota Tahun					Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
			oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																
		2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAA N TANAH	Persentase dokumen SPL yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	93,82%	100%	100%	100%	100%	93,82%	100%	100%	100%	100%
		2.10.10.2.0 1	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen SPL yang ditindaklanjuti	NA %	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan			NILAI SAKIP	NA	64/B	64/B	64/B	64/B		74/B	74/B	79,91/B	77,28/BB		115,98 %	115,98 %	124,86 %	120,75 %
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	NA persen	100%	100%	100%	100%		100%	100%	94,15%	100%		100%	100%	94,15%	100%
		X.XX.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggara n dan evaluasi kinerja	NA Dokume n	1 Dokume n	1 Dokume n	1 Dokume n	1 Dokume n		1 Dokume n	1 dokumen				100%	0%	0%	0%
		X.XX.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi Keuangan	NA Layana n	2 Layana n	2 Layana n	2 Layana n	2 Layana n		2 Layana n	2 Layana n	2 Layana n	2 Layana n		100%	100%	100%	100%

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota Tahun					Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan kepegawaian	NA Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan		1 Layanan		1 Layanan			100%	0%	100%	0%
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	NA Layanan	5 Layanan	5 Layanan	5 Layanan	5 Layanan		4 Layanan	4 Layanan	5 Layanan	5 Layanan		80%	80%	100%	100%
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	NA Layanan	3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan		2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan		66,67%	66,67%	66,67%	66,67%
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara	NA Unit	16 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit		15 Unit	15 Unit	32 Unit	33 Unit		93,75%	100,00%	213,33%	220,00%

Selanjutnya kinerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan berdasarkan penyerapan anggaran, dapat dilihat pada Tabel 2.9 sebagai berikut:

Tabel 2. 9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota Tahun					Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Pelayanan Infrastruktur Lingkungan yang Merata dan Berkualitas dalam Mencapai Tujuan Pembangunan Kota Tarakan				Cakupan Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Administrasi Pertanahan	-	38.614.543.905	47.988.724.303	31.832.329.000	31.835.449.000	-	37.761.237.080	46.277.412.815	60.965.418.527	50.947.705.807	-	97,79 %	96,43 %	191,52 %	160,03 %
	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni untuk MBR			Persentase Rumah untuk MBR yang terbangun dan terenovasi	-	1.347.276.921	1.289.999.000	1.340.000.000	1.340.000.000	-	1.336.267.064	1.185.332.440	1.125.580.397	2.708.538.920	-	99,18 %	91,89 %	84,00 %	202,13 %
		1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase ketersediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana / relokasi	-	59.203.238	189.999.030	140.000.000	140.000.000	-	51.703.499	89.943.610	86.496.840	145.017.900	-	87,33 %	47,34 %	61,78 %	103,58 %
		1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Cakupan rumah korban bencana yang dibangun dan/atau direhab	-	19.999.739	150.000.000	100.000.000	100.000.000	-	13.500.000	49.999.580	46.889.640	89.999.320	-	67,50 %	33,33 %	46,89 %	90,00%
		1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase penghunian rumah khusus	-	39.203.499	39.999.030	40.000.000	40.000.000	-	38.203.499	39.944.030	39.607.200	55.018.580	-	97,45 %	99,86 %	99,02 %	137,55 %

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota Tahun					Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
		1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase penghunian unit kamar rusunawa	-	-	-	-	-	-					-				
		1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase layanan ketersediaan rumah layak huni untuk MBR	-	1.288.073.683	1.099.999.970	1.200.000.000	1.200.000.000	-	1.284.563.565	1.095.388.830	1.039.083.557	2.563.521.020	-	99,73 %	99,58 %	86,59 %	213,63 %
		1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah RTLH yang terfasilitasi	-	1.288.073.683	1.099.999.970	1.200.000.000	1.200.000.000	-	1.284.563.565	1.095.388.830	1.039.083.557	2.563.521.020	-	99,73 %	99,58 %	86,59 %	213,63 %
	Menurunnya luas kawasan kumuh			Persentase lingkungan pemukiman kumuh	-	125.000.000	404.983.870	1.405.000.000	1.405.000.000	-	124.495.000	263.824.887	228.475.124	922.633.244	-	99,60 %	65,14 %	16,26 %	65,67%
		1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	-	125.000.000	404.983.870	1.405.000.000	1.405.000.000	-	124.495.000	263.824.887	228.475.124	922.633.244	-	99,60 %	65,14 %	16,26 %	65,67%

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota Tahun					Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
		1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase ijin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang diterbitkan	-	-	200.000.000	200.000.000	200.000.000	-		134.411.837	147.368.000		-		67,21 %	73,68 %	0,00%
		1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	persentase kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha yang tertata	-	-	54.999.810	5.000.000	5.000.000	-		54.793.050	2.449.915	99.365.145	-		99,62 %	49,00 %	1987,30 %
		1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah luasan kumuh dibawah 10 Ha yang tertangani (Ha)	-	125.000.000	149.984.060	1.200.000.000	1.200.000.000	-	124.495.000	74.620.000	78.657.209	823.268.099	-	99,60 %	49,75 %	6,55%	68,61%
	Meningkatnya lingkungan perumahan dan permukiman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)			Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang ditingkatkan	-	26.561.457.007	35.820.903.383	19.876.654.167	19.876.654.167	-	26.225.443.100	35.617.238.659	47.831.953.537	36.378.399.962	-	98,73 %	99,43 %	240,64 %	183,02 %

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota Tahun					Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
		1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang ditingkatkan	-	26.561.457.007	35.820.903.383	19.876.654.167	19.876.654.167	-	26.225.443.100	35.617.238.659	47.831.953.537	36.378.399.962	-	98,73 %	99,43 %	240,64 %	183,02 %
		1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Panjang Jalan Lingkungan yang dibangun	-	26.561.457.007	35.820.903.383	19.876.654.167	19.876.654.167	-	26.225.443.100	35.617.238.659	47.831.953.537	36.378.399.962	-	98,73 %	99,43 %	240,64 %	183,02 %
	Meningkatnya tertib administrasi pertanahan dalam pembangunan			Persentase konflik/sengketa tanah yang terselesaikan	-	-	39.985.400	30.000.000	30.000.000	-	-	28.952.000	21.939.000	25.518.300	-	0,00%	72,41 %	73,13 %	85,06%
				Persentase ganti kerugian dan/atau santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan	-	-	4.388.194.980	3.200.000.000	3.200.000.000	-	-	3.551.812.105	5.862.922.425	4.282.346.597	-		80,94 %	183,22 %	133,82 %
				Persentase dokumen SPL yang ditindaklanjuti	-	4.993.900.510	19.999.750	20.000.000	20.000.000	-	4.694.698.110	19.530.760	9.932.920	15.555.550	-	94,01 %	97,66 %	49,66 %	77,78%
		2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	-	-	39.985.400	30.000.000	30.000.000	-	-	28.952.000	21.939.000	25.518.300	-	0,00%	72,41 %	73,13 %	85,06%
		2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Cakupan penyelesaian sengketa tanah garapan	-	-	39.985.400	30.000.000	30.000.000	-		28.952.000	21.939.000	25.518.300	-	0,00%	72,41 %	73,13 %	85,06%

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota Tahun					Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
			dalam Daerah Kabupaten/ Kota																
		2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase ganti kerugian dan/atau santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan	-	-	4.388.194.980	3.200.000.000	3.200.000.000	-	-	3.551.812.105	5.862.922.425	4.282.346.597	-		80,94 %	183,22 %	133,82 %
		2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penerima ganti kerugian dan santunan tanah yang terselesaikan	-	-	4.388.194.980	3.200.000.000	3.200.000.000	-		3.551.812.105	5.862.922.425	4.282.346.597	-		80,94 %	183,22 %	133,82 %
		2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase dokumen SPL yang ditindaklanjuti	-	4.993.900.510	19.999.750	20.000.000	20.000.000	-	4.694.698.110	19.530.760	9.932.920	15.555.550	-	94,01 %	97,66 %	49,66 %	77,78%
		2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam	Persentase dokumen SPL yang ditindaklanjuti	-	4.993.900.510	19.999.750	20.000.000	20.000.000	-	4.694.698.110	19.530.760	9.932.920	15.555.550	-	94,01 %	97,66 %	49,66 %	77,78%

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota Tahun					Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
			satu Daerah Kabupaten/ Kota																
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan			NILAI SAKIP	-	5.586.909.467	6.024.657.920	5.960.674.833	5.963.794.833	-	5.380.333.806	5.610.721.964	5.884.615.124	6.614.713.234	-	96,30 %	93,13 %	98,72 %	110,91 %
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	-	5.586.909.467	6.024.657.920	5.960.674.833	5.963.794.833	-	5.380.333.806	5.610.721.964	5.884.615.124	6.614.713.234	-	96,30 %	93,13 %	98,72 %	110,91 %
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja	-	-	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-			-		-				
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi Keuangan	-	5.340.777.730	5.497.520.957	5.422.000.000	5.422.000.000	-	5.194.994.499	5.156.908.179	5.314.922.423	5.764.457.263	-	97,27 %	93,80 %	98,03 %	106,32 %
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan kepegawaian	-	13.200.000	-	40.000.000	40.000.000	-	13.200.000		14.268.000		-	100,00 %	0,00 %	35,67 %	0,00%

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota Tahun					Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	52.070.167	69.812.130	115.000.000	115.000.000	-	50.707.998	67.005.491	82.720.717	194.579.730	-	97,38 %	95,98 %	71,93 %	169,20 %
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	-	168.140.640	268.530.000	173.000.000	173.000.000	-	111.919.609	208.688.234	172.560.144	182.796.221	-	66,56 %	77,72 %	99,75 %	105,66 %
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara	-	12.720.930	183.794.833	205.674.833	208.794.833	-	9.511.700	178.120.060	300.143.840	472.880.020	-	74,77 %	96,91 %	145,93 %	226,48 %

Secara keseluruhan, rasio kinerja Anggaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Tarakan selama periode 2020–2024 menunjukkan pola yang bervariasi antara capaian yang sangat tinggi (melebihi 100%) dan capaian yang masih rendah (<70%). Beberapa indikator mencatat capaian yang sangat tinggi, misalnya Persentase Rumah MBR yang terbangun dan direnovasi tahun 2024 (202,13%), Penataan kawasan kumuh di bawah 10 Ha tahun 2023 (1987,30%), Pemeliharaan barang milik daerah tahun 2024 (226,48%). Namun, terdapat pula indikator yang konsisten rendah, misalnya Penurunan luas kawasan kumuh (16,26% di 2022, naik sedikit ke 65,67% di 2024), Cakupan rumah korban bencana yang direhabilitasi (hanya 33–67% pada 2021–2023) Penyelesaian konflik tanah (0% pada 2021, lalu perlahan meningkat). Hal ini menunjukkan bahwa kinerja perangkat daerah masih belum merata, ada program yang sangat efektif dan ada yang masih lemah dalam perencanaan, penganggaran, atau implementasi. Berikut penjelasannya:

- a. Sasaran Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni untuk MBR
 - Rata-rata capaian di atas 90%, bahkan menembus 202,13% pada 2024. Program rehabilitasi RTLH cukup berhasil. Lonjakan capaian 2024 menandakan adanya intervensi tambahan dari Pemerintah Propinsi serta Pemerintah Pusat diawal Tahun Renstra. Namun capaian menurun di 2022–2023 (84%).
- b. Penanganan Korban Bencana/Relokasi
 - Persentase capaian rendah pada 2021 (87%) dan turun ke 33–61% pada 2022–2023. Menunjukkan bahwa Rendahnya capaian menunjukkan keterbatasan data korban bencana yang terverifikasi, lambannya proses pengadaan lahan/material, atau lemahnya koordinasi dengan BPBD dan instansi lain.
- c. Penanganan Kawasan Kumuh
 - Ada inkonsistensi indikator. Pada satu sisi, luas kumuh yang tertangani sangat kecil (rendah capaian), tapi di sisi lain program penataan kecil-kecilan sangat tinggi. Hal ini menunjukkan adanya

mismatch antara indikator luas kumuh (outcome makro) dengan kegiatan lapangan (output mikro)

- d. PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas)
 - Realisasi melampaui target (240% di 2022, 183% di 2024). Hal ini menunjukkan bahwa kinerja PSU sangat baik, terutama pembangunan jalan lingkungan. Kelebihan capaian menandakan kebutuhan masyarakat sangat tinggi sehingga ada prioritas politik/anggaran. Namun, capaian yang terlalu tinggi bisa menimbulkan kesan bahwa perencanaan awal kurang akurat.
- e. Administrasi Pertanahan
 - Penyelesaian konflik tanah meningkat perlahan (0% → 85%).
 - Ganti rugi tanah sempit sangat tinggi (183% di 2023).
 - Dokumen SPL sempit drop di 2022 (49%).
 - Analisis: Perbaikan ada, tetapi inkonsistensi realisasi antar tahun menunjukkan lemahnya basis data pertanahan. Persoalan teknis verifikasi dan mediasi sering membuat target tidak tercapai.
- f. Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)
 - Capaian relatif stabil (93–110%). Perangkat daerah telah cukup konsisten menjaga akuntabilitas, meski capaian bukan faktor utama pembangunan fisik.

Rekomendasi Perbaikan sebagai acuan penyusunan dokumen Perencanaan selanjutnya antara lain:

- a. Perencanaan dan Targeting
 - Menyusun target berbasis baseline data yang valid agar tidak terlalu rendah yang menyebabkan terjadi capaian berlebihan maupun terlalu tinggi sehingga capaian yang rendah terus berulang.
 - Memperkuat integrasi *planning-budgeting* dengan mempertimbangkan tren realisasi tahun sebelumnya.
- b. Penanganan Kawasan Kumuh
 - Melakukan sinkronisasi indikator outcome dan output: target penurunan luas kumuh harus linier dengan volume kegiatan penataan kawasan.

- Fokus pada penyelesaian kawasan prioritas daripada kegiatan kecil yang membuat capaian semu.
- c. Rumah Korban Bencana/Relokasi
 - Memperbaiki mekanisme pendataan penerima manfaat (kolaborasi dengan BPBD, Disdukcapil, dan kecamatan).
 - Membentuk skema pembiayaan alternatif (CSR, dana cadangan) agar capaian tidak bergantung penuh pada APBD.
- d. Administrasi Pertanahan
 - Membangun sistem database pertanahan digital untuk mendukung penyelesaian konflik dan ganti rugi tanah.
 - Meningkatkan kapasitas mediasi melalui kerja sama dengan Kementerian ATR/BPN.
- e. PSU dan Infrastruktur
 - Menetapkan target yang lebih realistis dengan mempertimbangkan proyeksi kebutuhan 5 tahun ke depan.
 - Memprioritaskan kawasan padat penduduk dan rusunawa untuk peningkatan PSU.
- f. Akuntabilitas Kinerja
 - Mempertahankan capaian SAKIP dengan mendorong budaya kinerja berbasis outcome, bukan hanya output administratif.
 - Mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam SAKIP, agar capaian lebih konsisten.

Secara umum Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman yang merupakan tujuan OPD menunjukkan bahwa Anggaran relatif besar (di atas Rp30 miliar/tahun), dengan realisasi mencapai hingga 191,52% (2022) dan 160,03% (2024). Hal ini menunjukkan bahwa Realisasi yang jauh di atas target menandakan fleksibilitas fiskal atau adanya tambahan anggaran (refocusing, DAK tambahan, atau bantuan pusat). Namun, hal ini juga menunjukkan lemahnya *planning and budgeting*, karena target awal tidak realistis dibanding kebutuhan lapangan.

Tabel 2. 10 Capaian IKU, IKK dan SPM Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	IKU/IKK	REALISASI		TARGET				TARGET AKHIR	REALISASI				RASIO			
				2019	2020	2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	Cakupan Pelayanan Infrastruktur Perumahan, Permukiman dan Sarana Prasarana dan Utilitas Umum	%	IKU	100	100	100	100	100	100	100	101,80	78,21	100	99,79	102	78	100	100
2	Persentase Rumah untuk MBR yang terbangun dan terenovasi	%	IKU	20,15	21,39	40	60	80	100	100	51,34	66,52	88,96	98,17	128	111	111	98
3	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	%	IKU	52,72	42,44	49,17	31,74	17,64	6,87	6,87	49,17	31,77	17,43	9,37	100	100	99	136
4	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang ditingkatkan	%	IKU	-	-	100	100	100	100	100	83,33	100	98,67	100,00	83	100	99	100
5	Persentase konflik/sengketa tanah yang terselesaikan	%	IKU	25,00	81,81	100	100	100	100	100	96,77	50	33,33	100,00	97	50	33	100
6	Persentase ganti kerugian dan/atau santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan	%	IKU	50,00	43,46	100	100	100	100	100	0	100	85,71	100,00	0	100	86	100

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	IKU/IKK	REALISASI		TARGET				TARGET AKHIR	REALISASI				RASIO			
				2019	2020	2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
7	Persentase dokumen SPL yang ditindaklanjuti	%	IKU	50	100	100	100	100	100	100	97,44	100	100	100	97	100	100	100
8	NILAI SAKIP	Nilai	IKU	-	-	64/B	64/B	64/B	64/B	64/B	74/B	74,23/B	79,91/BB	77,28/BB	116	116	125	121
9	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	IKK	NA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	80,95	100	100	100	81
10	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	IKK	NA	100	100	100	100	100	100	100	100	0,00	0,00	100	100	0	0
11	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	%	IKK	NA	0,00	19,00	25,00	35,00	21,00	21,00	19,29	24,03	45,15	46,24	102	96	129	220
12	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	IKK	NA	4,95	3,07	2,17	1,37	0,65	0,65	1,61	1,06	1,97	0,23	148	151	56	165

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	IKU/IKK	REALISASI		TARGET				TARGET AKHIR	REALISASI				RASIO			
				2019	2020	2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
13	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	IKK	NA	100	51,99	68,94	83,06	100	100	1,63	66.56	24,25	1,38	3	0	29	1
14	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	IKK	NA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
15	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	%	IKK	NA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
16	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	%	IKK	NA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	100	100	100	0
17	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan	%	IKK	NA	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,75	100	0	0	104	556	0	0

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	IKU/IKK	REALISASI		TARGET				TARGET AKHIR	REALISASI				RASIO			
				2019	2020	2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee																	
18	Tersedianya tanah untuk masyarakat	%	IKK	NA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0	100%	100%	100%	0%
19	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	IKK	NA	81,82	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	22,22	50,00	33,33	100,00	28%	63%	42%	125%
20	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	SPM	NA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	100,00	50%	100%	100%	100%
20	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	%	SPM	NA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00	100,00	0,00	0,00	50%	100%	0%	0%

Sebagai bagian dari pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta berpedoman pada RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019–2024, dilakukan evaluasi capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) periode tahun 2019–2024.

Cakupan pelayanan infrastruktur perumahan, permukiman, serta prasarana dan utilitas umum pada periode evaluasi secara konsisten mendekati target 100 persen. Meskipun demikian, pada tahun 2022 terjadi penurunan rasio capaian menjadi 78,21 persen, yang menunjukkan adanya kendala operasional atau keterlambatan penyelesaian program. Kondisi ini berhasil dipulihkan pada tahun-tahun berikutnya dengan capaian kembali sesuai target.

Persentase rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang terbangun dan direnovasi memperlihatkan tren peningkatan signifikan, mencapai 88,96 persen pada tahun 2023 dan 98,17 persen pada tahun 2024. Walaupun capaian tersebut tergolong tinggi, rasio tahun 2024 sedikit di bawah target, mengindikasikan perlunya peningkatan efektivitas pembiayaan dan manajemen pelaksanaan kegiatan yang lebih baik.

Penurunan kawasan permukiman kumuh menunjukkan hasil yang sangat baik. Persentase kawasan kumuh berhasil diturunkan drastis dari 49,17 persen pada tahun 2021 menjadi hanya 6,87 persen pada tahun 2024. Capaian ini melampaui target yang telah ditetapkan (rasio 136 persen pada 2024), yang menandakan keberhasilan program pengentasan kumuh.

Indikator peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum secara umum stabil, meskipun sempat mengalami penurunan capaian menjadi 83,33 persen pada tahun 2021. Di sisi lain, indikator penyelesaian sengketa tanah memperlihatkan fluktuasi signifikan, dengan capaian terendah hanya 33,33 persen pada tahun 2022. Kondisi ini

mengindikasikan perlunya penguatan mekanisme mediasi dan koordinasi lintas sektor. Situasi serupa juga terjadi pada indikator penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah, yang sempat tidak mencapai capaian pada tahun 2021 namun membaik kembali pada tahun 2023.

Penilaian akuntabilitas kinerja (SAKIP) menunjukkan tren perbaikan, dari nilai B (64) pada awal periode menjadi BB (77–79) pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan dalam sistem manajemen kinerja dan akuntabilitas perangkat daerah.

Pada tingkat IKK, indikator penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana secara umum stabil, meskipun terjadi penurunan capaian menjadi 80,95 persen pada tahun 2024. Indikator fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi menunjukkan capaian nol persen pada tahun 2023 dan 2024, yang mengindikasikan hambatan serius baik dalam perencanaan, pendanaan, maupun pelaksanaan program relokasi.

Indikator penanganan kawasan kumuh di bawah 10 hektar menunjukkan keberhasilan yang signifikan, dengan capaian yang melampaui target hingga rasio 220 persen pada tahun 2024. Penurunan jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) juga menunjukkan arah yang positif, meskipun fluktuasi capaian antar tahun memperlihatkan perlunya penyesuaian target agar lebih realistis dan konsisten.

Sebaliknya, indikator penyediaan PSU untuk perumahan menunjukkan capaian yang menurun tajam, dengan rasio hanya 29 persen pada tahun 2023 dan 1 persen pada tahun 2024. Hal ini menandakan adanya kendala koordinasi dengan pengembang maupun keterbatasan pendanaan. Indikator tanah obyek landreform juga menunjukkan ketidakstabilan, dengan capaian melonjak tajam pada tahun 2022 (556 persen) namun tidak menunjukkan realisasi pada tahun 2023 dan 2024, yang mengindikasikan lemahnya pengelolaan data dan kebijakan redistribusi tanah.

Secara keseluruhan, capaian positif terlihat pada indikator penurunan kawasan kumuh, pembangunan rumah untuk MBR, serta

perbaikan nilai SAKIP. Namun demikian, tantangan masih terdapat pada penyediaan PSU, fasilitasi relokasi, penanganan sengketa tanah, dan pelaksanaan landreform. Hambatan-hambatan tersebut kemungkinan disebabkan oleh lemahnya koordinasi lintas perangkat daerah, keterbatasan pendanaan, serta belum optimalnya pemutakhiran data dasar.

Sebagai tindak lanjut, beberapa langkah strategis yang direkomendasikan adalah:

1. Memperkuat basis data RTLH dan MBR melalui survei lapangan yang akurat dan sistem informasi terintegrasi.
2. Membentuk tim kerja lintas perangkat daerah dan BPN untuk mempercepat penyediaan PSU, relokasi, dan penyelesaian sengketa tanah.
3. Mengintegrasikan pengendalian risiko ke dalam dokumen Renja dan Renja Perubahan.
4. Memanfaatkan teknologi digital, seperti dashboard pemantauan capaian triwulanan, untuk memperkuat monitoring dan evaluasi.
5. Meninjau kembali target indikator yang tidak relevan atau terlalu tinggi, khususnya terkait relokasi dan landreform, agar lebih selaras dengan kapasitas riil dan kondisi lapangan.

Dengan pelaksanaan langkah-langkah strategis tersebut, diharapkan kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Tarakan semakin konsisten dan berkelanjutan, serta mampu mendukung pencapaian sasaran RPJMD dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perumahan dan kawasan permukiman.

d. Kelompok Sasaran Layanan

Berdasarkan bidang urusannya, secara garis besar kelompok sasaran Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan terbagi menjadi:

1) Masyarakat

Kelompok sasaran masyarakat dapat dikelompokkan lagi menjadi, a) masyarakat umum di perumahan dan permukiman, terkait penyelenggaraan jalan lingkungan, dan penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Perumahan, b) masyarakat khusus, seperti kelompok swadaya masyarakat untuk korban bencana dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), terkait penyelenggaraan pembangunan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana serta perbaikan rumah tidak layak huni dan bedah rumah.

2) Stakeholder

Kelompok sasaran stakeholder merupakan pihak-pihak, baik itu kelompok masyarakat, pihak swasta ataupun instansi pemerintahan lain yang berkepentingan, terkait penyelenggaraan sengketa status pertanahan, pembentukan tim/satuan petugas pascabencana, dan kelompok swadaya masyarakat dalam penyadaran pencegahan permukiman kumuh serta perangkat daerah lain yang memiliki kepentingan dalam urusan kewenangan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan

e. Mitra Dinas dalam pemberian pelayanan

Mitra Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan dalam pemberian pelayanan antara lain:

1. Bersama dengan Kantor Pertanahan/ATR-BPN memfasilitasi sengketa tanah baik tanah masyarakat maupun tanah asset Pemerintah Daerah, karena saat ini tanah-tanah yang penguasaannya belum didasarkan pada bukti kepemilikan formal seperti sertifikat dan bukti-bukti dasar penguasaan, rentan menjadi objek konflik atau sengketa karena adanya klaim dari pihak-pihak lain.

2. Komitmen Kementerian ATR/BPN melalui Kantor Pertanahan bersama Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dengan pendekatan dari Desa/Kelurahan Lengkap (PTSL) secara berjenjang hingga Kabupaten/Kota, serta pensertifikatan tanah asset Pemerintah Daerah.

f. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja

Dukungan BUMD dalam Pencapaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan yaitu:

1. Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana melalui dukungan bagi masyarakat terdampak bencana oleh Pemerintah melalui Kementerian PUPR RI, CSR dari BUMN/BUMD dan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara.
2. Dukungan dan fasilitasi bantuan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni atau BSPS dari kementerian PUPR RI, Rutilahu dari Disperkim Provinsi Kalimantan Utara, hal ini karena ketidakmampuan masyarakat secara ekonomi untuk meningkatkan kualitas rumahnya sehingga masih ada masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni, serta fasilitasi optimalisasi pemanfaatan skema pembiayaan alternatif untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam pengembangan perumahan berbasis komunitas/kelompok masyarakat dan perumahan swadaya bagi MBR.
3. Melalui Kementerian PUPR juga melakukan upaya pengoptimalan peran stakeholder non-Pemerintah dan Pemda dalam melaksanakan penyediaan perumahan di Indonesia, diantara Upaya tersebut adalah pembentukan dan pembinaan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dan pembinaan kepada pemda yang melaksanakan pembangunan perumahan dari sumber Dana Alokasi Khusus (DAK).

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan

a. Permasalahan

Permasalahan dalam pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan teridentifikasi sebagai berikut:

1. Layanan Perumahan Terdampak Bencana & Relokasi

Permasalahan:

- Rendahnya mutu layanan rumah terdampak bencana/relokasi dan Data potensi rawan bencana belum ada.

Ketiadaan basis data rawan bencana dan kebutuhan rumah terdampak membuat penanganan bencana bersifat reaktif, bukan preventif. Mutu layanan rendah karena tidak ada standar teknis yang konsisten, keterbatasan anggaran, serta koordinasi lintas sektor belum optimal.

Arah Solusi:

- Penyusunan peta rawan bencana dan kebutuhan hunian terdampak.
- Penetapan standar layanan minimum hunian pascabencana.

2. Basis Data Perumahan & Permukiman

Permasalahan:

- Data kebutuhan jalan lingkungan yang harus diperbaiki belum ada dan Data RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) & MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) belum ada sehingga hal ini menyulitkan perencanaan, penganggaran, hingga evaluasi. Program perbaikan RTLH, PSU, maupun peningkatan jalan lingkungan sulit diukur keberhasilannya.

Arah Solusi:

- Pembangunan sistem informasi perumahan & permukiman terintegrasi.
- Pendataan periodik berbasis RT/RW hingga spasial GIS.

3. Keterjangkauan Perumahan bagi MBR

Permasalahan:

- Masih rendahnya keterjangkauan MBR untuk membangun/membeli rumah Dan Backlog perumahan meningkat. Hal ini disebabkan karena Harga rumah tidak sebanding dengan daya beli MBR. Skema subsidi/FLPP belum cukup menjangkau kebutuhan lokal. Lahan strategis semakin terbatas dan mahal.

Arah Solusi:

- Optimalisasi program rumah subsidi, insentif pengembang, dan kolaborasi Kementerian-Pemkot.
- Skema kredit ringan atau bantuan stimulan.

4. Permukiman & PSU

Permasalahan:

- Belum tuntasnya penanganan kawasan kumuh.
- Masih kurangnya perumahan dengan PSU.
- Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan perumahan layak & PSU.
- Masih banyak jalan lingkungan belum ditingkatkan.
- Masih rendahnya standar layanan dasar permukiman.

Arah Solusi:

- Program peremajaan/peningkatan kualitas kawasan permukiman.
- Penyediaan PSU wajib oleh pengembang dengan pengawasan ketat.

5. Pengelolaan Rusunawa

Permasalahan:

- Masih rendahnya aksesibilitas & kelayakan hunian Rusunawa.
- Banyak Rusunawa kondisinya tidak layak.

Arah Solusi:

- Revitalisasi rusunawa secara bertahap.
- Skema manajemen pengelolaan berbasis BLUD atau kerja sama swasta.
- Penyesuaian tarif dengan daya beli MBR.

6. Pengelolaan Pertanahan & Aset

Permasalahan:

- Belum optimalnya pengelolaan pertanahan.
- Rendahnya pengamanan aset lahan pemkot.
- Banyak tanah pemerintah diklaim masyarakat.
- Tanah pemerintah belum dipatok.
- Masih ada utang tanah.

Arah Solusi:

- Sertifikasi tanah pemkot.
- Inventarisasi aset berbasis GIS.
- Penyelesaian utang tanah melalui skema negosiasi dan anggaran bertahap.

b. Isu Strategis

Isu Strategis Peningkatan layanan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan di Kota Tarakan menjadi semakin mendesak karena berbagai faktor struktural dan dinamis yang saling berkaitan.

Pertama, dari sisi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perumahan dan permukiman, pemerintah daerah memiliki kewajiban dasar untuk menjamin masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mendapatkan rumah layak dan lingkungan permukiman yang sehat. Artinya, penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) dan pengurangan kawasan kumuh bukan lagi sekadar program, melainkan kewajiban hukum yang harus dipenuhi dengan target terukur setiap tahunnya.

Kedua, Kota Tarakan yang merupakan pulau kecil, menghadapi tantangan serius dari sisi keterbatasan lahan. Urbanisasi yang cepat, arus migrasi, serta pertumbuhan penduduk meningkatkan kebutuhan hunian, sementara ketersediaan lahan semakin terbatas. Akibatnya, harga tanah terus naik dan hunian layak semakin sulit dijangkau oleh MBR. Tanpa strategi pengembangan hunian vertikal seperti rumah susun, backlog perumahan akan semakin membesar, dan risiko tumbuhnya permukiman kumuh baru tidak dapat dihindari.

Ketiga, faktor perubahan iklim dan risiko bencana. Kota Tarakan sebagai kota pesisir, rentan terhadap banjir rob, abrasi pantai, curah hujan ekstrem, dan kebakaran di kawasan padat. Banyak permukiman kumuh berdiri di sempadan pantai atau bantaran, sehingga warganya hidup dalam kondisi rawan. Jika tidak ada upaya adaptasi melalui infrastruktur permukiman tahan iklim, proteksi pesisir, dan perencanaan berbasis mitigasi risiko, kerugian sosial dan ekonomi akan terus meningkat.

Keempat, dari sisi kebijakan nasional, RPJPN dan RPJMN menargetkan pengurangan backlog, penanganan RTLH, dan percepatan penghapusan kawasan kumuh, termasuk kumuh pesisir. Kota Tarakan melalui DPRKPP harus menyesuaikan strategi daerah dengan agenda nasional ini agar bisa memperoleh dukungan program pusat seperti BSPS, DAK Perkim, dan pembangunan rumah susun. Dengan demikian, keberhasilan daerah sangat ditentukan oleh kemampuan menyelaraskan rencana lokal dengan arah pembangunan nasional.

Kelima, transformasi digital menjadi kebutuhan mendesak. Saat ini, data RTLH, MBR, kawasan kumuh, dan PSU masih tersebar di berbagai unit dan sering kali tidak mutakhir. Akibatnya, penentuan prioritas program kurang tepat sasaran. Dengan membangun Satu Data Perumahan dan Kawasan Permukiman berbasis NIK dan spasial, pemerintah dapat memastikan setiap intervensi tepat sasaran, transparan, dan dapat dipantau masyarakat. Sistem digital juga memungkinkan layanan lebih cepat, mulai dari usulan bantuan rumah, verifikasi, hingga pengawasan proyek.

Keenam, isu *SDGs* 11 dan urbanisasi memperkuat urgensi tersebut. *SDGs* menekankan pentingnya kota yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Target global seperti mengurangi proporsi penduduk yang tinggal di kawasan kumuh, meningkatkan akses sanitasi, dan memperluas ruang publik harus diterjemahkan ke dalam program lokal. Tarakan sebagai kota yang berkembang cepat perlu memastikan

bahwa pertumbuhan penduduk dan migrasi tidak justru memperburuk ketimpangan akses hunian.

Ketujuh, persoalan keterbatasan fiskal menjadi tantangan utama. Kapasitas APBD tidak cukup untuk menutup seluruh kebutuhan hunian dan PSU, sementara backlog dan luas kawasan kumuh masih besar. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembiayaan campuran (*blended finance*) dengan menggabungkan APBD, APBN, kemitraan swasta (KPBU), CSR, hingga pemanfaatan nilai tambah lahan (*land value capture*). Tanpa inovasi pembiayaan, target SPM maupun RPJMN tidak akan tercapai.

Permasalahan dan Isu Strategis dalam pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan terdapat pada Tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 2. 11 Pemetaan Permasalahan dan Isu Strategis

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Ketersediaan Lahan yang Dapat Dialokasikan untuk Relokasi	Rendahnya mutu layanan rumah terdampak bencana/relokasi			Pemenuhan SPM bidang perumahan & permukiman		Peningkatan layanan hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan
Dorongan digitalisasi layanan pemerintah	Data potensi rawan bencana belum ada		Perubahan iklim & risiko bencana			
	Data kebutuhan jalan yang harus diperbaiki belum ada			Transformasi digital		
	Data RTLH & MBR belum ada			Transformasi digital		
Program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) dari Kementerian PUPR	Masih rendahnya keterjangkauan MBR untuk membangun/membeli rumah			RPJPN/RPJMN: Hunian layak, pengurangan kumuh, backlog		
Dukungan program DAK bidang permukiman	Belum tuntasnya penanganan kawasan kumuh	Perlunya peningkatan kualitas hidup masyarakat pemukiman pesisir		RPJPN/RPJMN: Hunian layak, pengurangan kumuh, backlog	Kawasan kumuh perkotaan & pesisir	

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kewenangan daerah untuk mengalokasikan DAK dan APBD dalam pembangunan PSU perumahan.	Masih kurangnya perumahan dengan PSU			RPJPN/RPJMN: Hunian layak, pengurangan kumuh, backlog	Keterbatasan lahan Kota Tarakan (pulau kecil)	
	Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan perumahan layak & PSU		SDGs 11 & urbanisasi			
	Masih banyak jalan lingkungan belum ditingkatkan			Pemenuhan layanan perumahan & permukiman		
Peluang kemitraan swasta/CSR dalam peningkatan kualitas permukiman	Masih rendahnya standar layanan dasar permukiman		SDGs 11 & urbanisasi			
	Masih rendahnya aksesibilitas & kelayakan hunian Rusunawa			Pemenuhan layanan perumahan & permukiman	Keterbatasan lahan Kota Tarakan (pulau kecil)	
Digitalisasi data pertanahan	Belum optimalnya pengelolaan pertanahan			Reforma agraria & pengelolaan pertanahan		

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Rendahnya pengamanan aset lahan Pemkot			Reforma agraria & pengelolaan pertanahan		
Kebijakan reforma agraria	Banyak tanah pemerintah diklaim masyarakat			Reforma agraria & pengelolaan pertanahan		
	Tanah pemerintah belum dipatok			Reforma agraria & pengelolaan pertanahan		
	Masih ada utang tanah			Reforma agraria & pengelolaan pertanahan		
Ketersediaan lahan pemerintah untuk hunian vertikal	Banyak Rusunawa kondisinya tidak layak			Pemenuhan layanan perumahan & permukiman		
Dukungan program sejuta rumah nasional yang masih berjalan	Backlog perumahan meningkat				Pertumbuhan penduduk & migrasi	
Fasilitas pembiayaan perumahan dari Perbankan	Masih rendahnya keterjangkauan MBR			Keterbatasan fiskal		

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan Tahun 2025-2029 pada prinsipnya merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan Kota Tarakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Penjabaran tersebut terutama pada misi yang terkait langsung dengan tugas, pokok, dan fungsinya (Tupoksi) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan.

3.1. Tujuan Renstra Tahun 2025-2029

Berdasarkan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan, tujuan jangka menengah Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan yaitu:

Tujuan:

“Meningkatnya layanan hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan”

Tujuan ini mencerminkan mandat utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan, yaitu memastikan setiap warga khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dapat mengakses hunian yang memenuhi standar kelayakan, harga yang wajar, serta memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Tujuan ini memiliki 2 (dua) indikator yaitu:

Indikator Tujuan 1:

Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak terjangkau dan berkelanjutan

Indikator ini bersifat outcome utama karena langsung mencerminkan capaian kualitas hidup masyarakat. Mengintegrasikan aspek layak (fisik rumah dan kelengkapan PSU), terjangkau (keterjangkauan biaya

pembangunan/pembelian/penyewaan), dan berkelanjutan (ramah lingkungan, aman bencana, serta berkelanjutan sosial-ekonomi).

Indikator Tujuan 2:

Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah yang mendapat Dukungan Pembangunan Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator ini menekankan peran strategis pertanahan dalam mendukung pengembangan kawasan perumahan dan permukiman. Konsolidasi tanah bukan hanya soal legalitas, tetapi juga instrumen perencanaan ruang yang dapat mengurangi konflik lahan, meningkatkan nilai tanah, dan mempercepat penyediaan lahan untuk perumahan rakyat. Relevan dengan isu keterbatasan lahan di perkotaan.

3.2. Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Sasaran Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Periode Renstra Tahun 2025-2029 ada 3 (tiga) Sasaran, yaitu:

Sasaran 1:

“Meningkatnya Aksesibilitas dan Keterjangkauan Sarana Prasarana Permukiman”

Sasaran ini mempertegas bahwa Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan mempunyai tugas untuk menjadikan kawasan permukiman tidak hanya memiliki rumah layak, tetapi juga dilengkapi PSU (jalan lingkungan, drainase, air bersih, listrik, persampahan, dan ruang terbuka hijau).

Indikator Sasaran 1:

Persentase Permukiman yang Sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum).

Indikator ini mengukur pemerataan pembangunan, sekaligus mendukung pencapaian pemenuhan layanan bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Sasaran 1 ini relevan dengan Sasaran ke-6 RPJMD yaitu Meningkatkan layanan hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan

Sasaran 2:

“Meningkatnya aset tanah pemerintah yang berkepastian hukum”

Sasaran ini mempunyai makna bahwa Kepastian hukum atas tanah menjadi pondasi penting untuk pembangunan fasilitas publik, rumah susun, permukiman baru, serta investasi pemerintah.

Indikator Sasaran 2:

Ditetapkannya Hak Atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah

Indikator ini mendukung tata kelola pertanahan, mengurangi potensi sengketa, dan memberikan jaminan legalitas Pembangunan.

Sasaran 2 ini relevan dengan Sasaran ke-11 RPJMD yaitu Meningkatkan akuntabilitas keuangan.

Sasaran 3:

“Meningkatnya Tata Kelola OPD”

Sasaran ini bermakna tata kelola yang baik merupakan syarat mutlak agar seluruh program perumahan, permukiman, dan pertanahan berjalan efektif, efisien, dan akuntabel.

Indikator Sasaran 3:

1. Nilai SAKIP, Mengukur sejauh mana kinerja berbasis perencanaan, penganggaran, dan pelaporan terintegrasi.
2. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat), Mengukur kualitas pelayanan publik dari sisi penerima layanan, terutama masyarakat penerima manfaat program perumahan dan PSU.

Sasaran 3 ini relevan dengan Sasaran ke-10 RPJMD yaitu Meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Matriks Tujuan dan Sasaran serta target Kinerja Tahun 2025-2029 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan terdapat pada Tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	T1: Meningkatnya layanan hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (Sasaran RPJMD)		T1: Indikator Tujuan 1: Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak terjangkau dan berkelanjutan	71.08%	73.51%	75.82%	78.01%	80.11%	82.11%	
S-6 Meningkatnya layanan hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan		S1.1: Sasaran 1: Meningkatnya Aksesibilitas dan Keterjangkauan Sarana Prasarana Permukiman	S1.1: Indikator Sasaran 1: Persentase Permukiman yang Sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	34.00%	38.24%	42.32%	46.26%	50.07%	53.75%	
S-10 Meningkatnya akuntabilitas kinerja		S1.2: Sasaran 3: Meningkatnya Tata Kelola OPD	S1.2.1: Nilai SAKIP	84,23	84,24	84.26	84.28	84.30	84.40	
			S1.2.2: IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	88	88.5	89	89.5	90	90.5	
	T1: Meningkatnya layanan hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (Sasaran RPJMD)		T2: Indikator Tujuan 2: Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah yang mendapat Dukungan Pembangunan Kewenangan Kabupaten/Kota	39.29%	39.57%	39.71%	39.85%	39.99%	40.13%	
S-11 Meningkatnya akuntabilitas keuangan		S2.1: Sasaran 2: Meningkatnya aset tanah pemerintah yang berkepastian hukum	S2.1: Indikator Sasaran 2: Persentase Penetapan Hak Atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	28.10%	28.80%	30.75%	57.12%	76.12%	85.76%	

3.3. Strategi

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kota Tarakan Tahun 2025-2029 serta tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan, dirumuskan strategi pembangunan sebagai langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Strategi dan kebijakan dilandasi oleh pertimbangan mengenai konsep dan pendekatan dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemilahan urusan yang menjadi kewenangan dan dijadikan dasar dalam menyusun program-program, kegiatan dan sub kegiatan dalam lima tahun ke depan.

Strategi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan yaitu:

Tahap 1 (2026)

Fokus pada pendataan, legalisasi, dan penyiapan dasar kebijakan antara lain: percepatan pendataan RTLH, baseline kawasan kumuh, inventarisasi aset dan lahan pemerintah, serta penyusunan SOP penanganan bencana dan relokasi. Layanan dasar sekretariat diperkuat dengan standar SOP, serta mulai dilakukan tindak lanjut LHE AKIP secara terukur.

Tahap II (2027)

Mengutamakan implementasi awal dan kolaborasi lintas pihak antara lain: penanganan RTLH meningkat lewat dukungan APBN/APBD, perbaikan jalan lingkungan diprioritaskan di kawasan padat, redistribusi tanah tahap awal dilakukan, serta percepatan sertifikasi aset tanah Pemda. Layanan sekretariat mulai terdigitalisasi dan rencana tindak lanjut LHE diintegrasikan ke perencanaan.

Tahap III (2028)

Masuk fase penguatan dan inovasi berbasis masyarakat dan teknologi antara lain: penanganan RTLH dengan model *community-based housing*, intervensi kumuh berbasis partisipasi warga, pengawasan aset tanah berbasis GIS, serta pengembangan hunian transisi ramah

lingkungan. Layanan kesekretariatan mulai berbasis survei kepuasan dan sistem e-SAKIP diterapkan untuk tindak lanjut LHE.

Tahap IV (2029)

Difokuskan pada integrasi program dan perluasan capaian antara lain: RTLH dikaitkan dengan program PSU, kawasan kumuh dihubungkan dengan kawasan strategis kota, penyelesaian sengketa tanah dipercepat hingga 75%, serta redistribusi tanah tahap lanjutan disertai pendampingan usaha produktif. Layanan kesekretariatan beralih ke *office automation system*, sedangkan LHE AKIP ditindaklanjuti melalui audit internal tahunan.

Tahap V (2030)

Menjadi fase pemantapan dan pencapaian target penuh yaitu backlog RTLH diminimalisasi <5%, seluruh relokasi dan korban bencana memperoleh hunian layak, kawasan kumuh <10 ha tuntas, dan 100% aset tanah pemerintah sah serta aman secara hukum. Reforma agraria terpadu selesai dilaksanakan, rekomendasi LHE ditindaklanjuti 100%, dan indeks layanan kesekretariatan mencapai kategori “Sangat Baik”.

Tabel 3 2 Strategi Dinas

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pendataan, legalisasi, dan penyiapan dasar kebijakan	Implementasi awal dan kolaborasi lintas pihak	Inovasi berbasis masyarakat dan teknologi	Integrasi program dan perluasan capaian	Pencapaian target

3.4. Arah Kebijakan

Arah kebijakan Dinas Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan dalam mengimplementasikan strategi yang selaras dengan Arah kebijakan RPJMD ada pada Tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3 3 Arah Kebijakan

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(1)	(3)	(4)	(5)
1	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penurunan jumlah Rumah Tidak Layak Huni	Penyelenggaraan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	
		Pemenuhan rumah bagi korban bencana dan terdampak program pemerintah	Penyediaan data dan informasi lahan potensial yang aman, sesuai ruang dan layak secara sosial-ekonomi sebagai lokasi relokasi perumahan	
			Peningkatan aksesibilitas dan keterjangkauan rusus dan rusunawa	
		Peningkatan wilayah permukiman terlayani PSU dasar	Pelaksanaan operasional PSU Perumahan	
			Pelaksanaan peningkatan jalan lingkungan permukiman sesuai rencana teknis	
		Penurunan luas kawasan kumuh	Pelaksanaan kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha sesuai standar teknis	
			Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha sesuai standar teknis	
2	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan		Penyediaan data dan informasi lahan potensial yang aman, sesuai ruang dan layak secara sosial-	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(1)	(3)	(4)	(5)
	Minimal Urusan Perumahan Rakyat		ekonomi sebagai lokasi relokasi perumahan	
3	Permen ATR/BPN No 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan	Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Tata Kelola Pemerintahan	Pelaksanaan penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan masyarakat	
4	Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah		Penyelesaian Pembayaran ganti kerugian Tanah untuk Pembangunan	
5	Permen ATR/BPN No 19 Tahun 2021 tentang Juknis Pengadaan Tanah		Penyediaan Lahan yang siap bangun	
6	Perpres No.62 tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria		Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pemanfaatan redistribusi tanah dan penataan aset reforma agraria	

Dalam rangka mewujudkan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan di Kota Tarakan, penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan berpedoman pada berbagai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan Pemerintah Pusat, serta diarahkan oleh kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD. Seluruh arah kebijakan Renstra PD diturunkan secara langsung dari amanat NSPK dan prioritas RPJMD, sehingga pelaksanaan program/kegiatan/Subkegiatan dapat menjamin keterpaduan, kepastian hukum, dan efektivitas pelayanan publik.

Pertama, PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman menjadi dasar utama dalam penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), pemenuhan rumah bagi korban bencana, penyediaan rumah susun sederhana (rusus) dan rumah susun sewa (rusunawa), serta penataan kawasan permukiman kumuh. Dalam kerangka RPJMD, kebijakan ini diwujudkan melalui

penurunan jumlah RTLH, penurunan luas kawasan kumuh, peningkatan wilayah permukiman terlayani prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) dasar, serta pemenuhan rumah bagi korban bencana dan program relokasi. Arah kebijakan Renstra PD kemudian diformulasikan dalam bentuk penyelenggaraan rehabilitasi RTLH, penyediaan data dan informasi lahan potensial relokasi yang aman dan sesuai rencana tata ruang, pelaksanaan operasional PSU, peningkatan jalan lingkungan permukiman, serta kegiatan penataan dan peningkatan kualitas kawasan kumuh sesuai standar teknis.

Kedua, Permen PUPR Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat menegaskan kewajiban pemerintah daerah dalam memenuhi pelayanan dasar bidang perumahan. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan memastikan penyediaan data dan informasi lahan potensial untuk relokasi perumahan dengan validasi lapangan secara berkala.

Ketiga, dalam aspek pertanahan, Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, PP Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah, serta Permen ATR/BPN Nomor 19 Tahun 2021 tentang Juknis Pengadaan Tanah mengarahkan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas tata kelola pertanahan. Arah kebijakan Renstra PD mencakup penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan masyarakat, penyediaan lahan siap bangun, serta penyelesaian pembayaran ganti rugi tanah untuk pembangunan. Implementasi kebijakan ini mendukung pencapaian sasaran RPJMD berupa peningkatan kualitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan, serta memastikan kelancaran pembangunan infrastruktur perumahan.

Keempat, Perpres Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Reforma Agraria memberikan dasar hukum untuk pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi redistribusi tanah dan penataan aset. Melalui kebijakan ini, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan berperan aktif mendukung redistribusi tanah sebagai upaya pemerataan akses lahan bagi Masyarakat

Berpenghasilan Rendah (MBR) dan pemanfaatannya untuk pengembangan kawasan permukiman yang sesuai rencana tata ruang dan kebutuhan PSU dasar.

Integrasi seluruh kebijakan tersebut memastikan bahwa arah pembangunan perumahan dan permukiman di Kota Tarakan selaras dengan RPJMD, SPM, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Renstra PD tidak hanya menitikberatkan pada output fisik seperti jumlah rumah yang direhabilitasi atau panjang jalan lingkungan yang ditingkatkan, tetapi juga pada *outcome* strategis: penurunan backlog perumahan, pengurangan kawasan kumuh, peningkatan keterjangkauan hunian, dan penguatan ketahanan permukiman terhadap bencana dan perubahan iklim.

Dengan pendekatan ini, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan diharapkan mampu menyediakan pelayanan publik yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel, sekaligus mendorong terciptanya lingkungan permukiman yang aman, sehat, produktif, dan berdaya saing sesuai visi pembangunan Kota Tarakan.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan menggunakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada pada urusan pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan urusan pemerintahan Bidang Pertanahan. Adapun program di dalamnya memuat kegiatan dan sub kegiatan yang secara keseluruhan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050.5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Uraian Program/kegiatan/sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan Pagu indikatif Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan terdapat pada Tabel 4.1 dan Tabel 4.2 dibawah ini.

Tabel 4. 1 Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Rencana Strategis

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	T1: Meningkatnya layanan hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (Sasaran RPJMD)				T1: Indikator Tujuan 1: Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak terjangkau dan berkelanjutan		
S-6 Meningkatnya layanan hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan		S1.1: Sasaran 1: Meningkatnya Aksesibilitas dan Keterjangkauan Sarana Prasarana Permukiman			S1.1: Indikator Sasaran 1: Persentase Permukiman yang Sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)		
			OC1.1.1: Menurunnya Jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni (LPPD)		OC1.1.1: Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani (IKK Outcome 1.d.4)	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Kabid
				OT1.1.1.1: Terselenggaranya Rehabilitasi terhadap Rumah tidak Layak Huni	OT1.1.1.1: Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Direhabilitasi	1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	JF
			OS1.1.1.1.1: Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		OS1.1.1.1.1: Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.04.04.2.01.0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Staf
			OS1.1.1.1.2: Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka Pencegahan Kumuh		OS1.1.1.1.2: Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	1.04.04.2.01.0004 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Staf

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			OC1.1.2: Pemenuhan rumah bagi korban bencana dan terdampak program pemerintah		OC1.1.2: 1. Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni (IKK Outcome 1.d.1)	1.04.02: PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Kabid
					OC1.1.2: 2. Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (IKK Outcome 1.d.2)		Kabid
				OT1.1.2.1: Tersedianya data dan informasi lahan potensial yang aman, sesuai ruang dan layak secara sosial-ekonomi sebagai lokasi relokasi perumahan	OT1.1.2.1: Jumlah dokumen database rumah terdampak bencana atau program relokasi	1.04.02.2.01: Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	JF
				OS1.1.2.1.1: Tersusunnya Dokumen Data Lahan Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	OS1.1.2.1.1: Jumlah lokasi lahan potensial yang teridentifikasi dan terdokumentasi	1.04.02.2.01.0002: Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Staf
				OT1.1.2.2: Tersedianya data dan informasi lahan potensial yang aman, sesuai ruang dan layak secara sosial-ekonomi sebagai lokasi relokasi perumahan	OT1.1.2.2: Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	1.04.02.2.03: Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	JF
					OT1.1.2.2: Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah		
				OS1.1.2.2.1: Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	OS1.1.2.2.1: Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Staf

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				OS1.1.2.2.2: Tersusunnya Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	OS1.1.2.2.2: Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1.04.02.2.01.0006 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Staf
				OS1.1.2.2.3: Terfasilitasinya Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	OS1.1.2.2.3: Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah	1.04.02.2.03.0008 Fasilitas Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Staf
				OT1.1.2.3: Meningkatkan aksesibilitas dan keterjangkauan rusus dan rusunawa	OT1.1.2.3: 1. PAD urusan rusus dan rusunawa	1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Kepala UPTD
					OT1.1.2.3: 2. jumlah rusus yang layak dan memadai		
					OT1.1.2.3: 3. jumlah rusunawa yang layak dan memadai		
				OS1.1.2.3.1: Terlaksananya operasional dan pemeliharaan rumah susun yang merupakan aset pemerintah kabupaten/kota	OS1.1.2.3.1: Jumlah Tanah dan/atau Bangunan Milik Bersama yang menjadi bagian rumah susun yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	1.04.02.2.05.0008 Operasional dan Pemeliharaan Rumah Susun yang merupakan aset pemerintah kabupaten/kota	Staf
			OC1.1.3: Meningkatnya wilayah permukiman terlayani PSU dasar		OC1.1.3: Persentase jalan lingkungan yang layak	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Kabid
				OT1.1.3.1: 2. Terlaksananya operasional PSU Perumahan	OT1.1.3.1: 2. Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (IKK Outcome 1.d.5)	1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	JF

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				OS1.1.3.1.1: Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	OS1.1.3.1.1: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1.04.05.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Staf
				OS1.1.3.1.2: Terlaksananya Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	OS1.1.3.1.2: Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	1.04.05.2.01.0011 Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Staf
				OT1.1.3.2: 1. Terlaksananya peningkatan jalan lingkungan permukiman sesuai rencana teknis	OT1.1.3.2: 1. Panjang jalan lingkungan yang layak	1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	JF
				OS1.1.3.2.1: Terlaksananya Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	OS1.1.3.2.1: Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	1.04.05.2.01.0010 Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Staf
				OS1.1.3.2.2: Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	OS1.1.3.2.2: Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	1.04.05.2.01.0012 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Staf
			OC1.1.4: Menurunnya luas kawasan kumuh		OC1.1.4: Persentase Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (IKK Outcome 1.d.3)	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Kabid
				OT1.1.4.1: Terlaksananya kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha sesuai standar teknis	OT1.1.4.1: Luas kawasan kumuh dengan Luas Di bawah 10 Ha yang ditangani	1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	JF
				OS1.1.4.1.1: Tersusun/Tereview/Terlegalisasinya Kebijakan Bidang PKP	OS1.1.4.1.1: Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	1.04.03.2.02.0008 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Staf

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				OS1.1.4.1.2: Terlaksananya Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	OS1.1.4.1.2: Jumlah Dokumen Hasil Survey dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1.04.03.2.02.0014 Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Staf
				OT1.1.4.2: Terlaksananya kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha sesuai standar teknis	OT1.1.4.2: Luas kawasan kumuh dengan Luas Di bawah 10 Ha yang ditangani	1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	JF
				OS1.1.4.2.1: Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	OS1.1.4.2.1: Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Staf
				OS1.1.4.2.2: Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	OS1.1.4.2.2: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran /Peremajaan Permukiman Kumuh	1.04.03.2.03.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran /Peremajaan Permukiman Kumuh	Staf
				OS1.1.4.2.3: Terlaksananya Pemugaran di Kawasan Permukiman Kumuh	OS1.1.4.2.3: Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	1.04.03.2.03.0013 Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Staf
S-10 Meningkatnya akuntabilitas kinerja		S1.2: Sasaran 3: Meningkatnya Tata Kelola OPD		S1.2.1: Nilai SAKIP			
				S1.2.2: IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)			
			OC1.2.1:1. Meningkatkan penguatan internal akuntabilitas kinerja		OC1.2.1: 1. Persentase LHE AKIP yang ditindaklanjuti	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sekretaris
				OT1.2.1.1: Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	OT1.2.1.1: Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kasubag PRK

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				OS1.2.1.1.1: Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	OS1.2.1.1.1: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.04.01.2.01.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Staf
				OS1.2.1.1.2: Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	OS1.2.1.1.2: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.04.01.2.01.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Staf
				OS1.2.1.1.3: Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	OS1.2.1.1.3: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.04.01.2.01.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Staf
				OS1.2.1.1.4: Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	OS1.2.1.1.4: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1.04.01.2.01.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Staf
				OS1.2.1.1.5: Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	OS1.2.1.1.5: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.04.01.2.01.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Staf
				OS1.2.1.1.6: Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	OS1.2.1.1.6: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.04.01.2.01.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Staf
				OS1.2.1.1.7: Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	OS1.2.1.1.7: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.04.01.2.01.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Staf

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				OS1.2.1.1.8: Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	OS1.2.1.1.8: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1.04.01.2.01.8 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Staf
				OS1.2.1.1.9: Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	OS1.2.1.1.9: Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1.04.01.2.01.9 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Staf
				OS1.2.1.1.10: Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	OS1.2.1.1.10: Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	1.04.01.2.01.11 Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Staf
				OT1.2.1.2: Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan sesuai SAP	OT1.2.1.2: Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan sesuai SAP	1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kasubag PRK
				OS1.2.1.2.1: Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	OS1.2.1.2.1: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.04.01.2.02.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Staf
				OS1.2.1.2.2: Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	OS1.2.1.2.2: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.04.01.2.02.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Staf
				OS1.2.1.2.3: Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	OS1.2.1.2.3: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.04.01.2.02.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Staf

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				OS1.2.1.2.4: Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	OS1.2.1.2.4: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.04.01.2.02.7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Staf
				OS1.2.1.2.5: Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	OS1.2.1.2.5: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.04.01.2.02.8 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Staf
			OC1.2.2: 2. Meningkatnya layanan kesekretariatan		OC1.2.2: 2. Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sekretaris
				OT1.2.2.1: Meningkatnya kinerja dan kompetensi ASN	OT1.2.2.1: Nilai IP ASN Perangkat Daerah	1.04.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kasubag Umum
				OS1.2.2.1.1: Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	OS1.2.2.1.1: Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1.04.01.2.05.1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Staf
				OS1.2.2.1.2: Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	OS1.2.2.1.2: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1.04.01.2.05.2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Staf
				OS1.2.2.1.4: Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	OS1.2.2.1.4: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.04.01.2.05.5 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Staf
				OS1.2.2.1.6: Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	OS1.2.2.1.6: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1.04.01.2.05.9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Staf
				OS1.2.2.1.8: Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	OS1.2.2.1.8: Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.04.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Staf

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				OT1.2.2.2: Tersedianya layanan administrasi umum dan jasa penunjang	OT1.2.2.2: Jumlah ASN yang terlayani	1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kasubag Umum
				OS1.2.2.2.1: Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	OS1.2.2.2.1: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.04.01.2.06.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Staf
				OS1.2.2.2.3: Tersedianya Bahan Logistik Kantor	OS1.2.2.2.3: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1.04.01.2.06.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Staf
				OS1.2.2.2.4: Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	OS1.2.2.2.4: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1.04.01.2.06.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Staf
				OS1.2.2.2.7: Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	OS1.2.2.2.7: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.04.01.2.06.9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Staf
				OS1.2.2.2.9: Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	OS1.2.2.2.9: Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.04.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Staf
				OT1.2.2.3: Terkelolanya Pendataan barang Milik Daerah	OT1.2.2.3: Persentase Barang Milik Daerah yang terinput dalam aplikasi e-BMD	1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kasubag Umum
				OS1.2.2.3.1: Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	OS1.2.2.3.1: Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1.04.01.2.07.1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Staf
				OS1.2.2.3.2: Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	OS1.2.2.3.2: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1.04.01.2.07.2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Staf
				OS1.2.2.3.3: Tersedianya Mebel	OS1.2.2.3.3: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1.04.01.2.07.5 Pengadaan Mebel	Staf

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				OS1.2.2.3.5: Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	OS1.2.2.3.5: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1.04.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Staf
				OT1.2.2.4: Tersedianya layanan jasa penunjang	OT1.2.2.4: Persentase layanan jasa penunjang yang tersedia	1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kasubag Umum
				OS1.2.2.4.1: Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	OS1.2.2.4.1: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.04.01.2.08.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Staf
				OS1.2.2.4.2: Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	OS1.2.2.4.2: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.04.01.2.08.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Staf
				OS1.2.2.4.4: Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	OS1.2.2.4.4: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.04.01.2.08.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Staf
				OT1.2.2.5: Terkelolanya Pendataan barang Milik Daerah	OT1.2.2.5: Persentase Barang Milik Daerah yang mendapatkan pemeliharaan	1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kasubag Umum
				OS1.2.2.5.1: Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	OS1.2.2.5.1: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1.04.01.2.09.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Staf
				OS1.2.2.5.2: Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	OS1.2.2.5.2: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1.04.01.2.09.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Staf
				OS1.2.2.5.3: Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	OS1.2.2.5.3: Jumlah Mebel yang Dipelihara	1.04.01.2.09.5 Pemeliharaan Mebel	Staf
				OS1.2.2.5.5: Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	OS1.2.2.5.5: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.04.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	Staf

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Kantor atau Bangunan Lainnya	
				OS1.2.2.5.6: Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	OS1.2.2.5.6: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.04.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Staf
S-11 Meningkatnya akuntabilitas keuangan	T1: Meningkatnya layanan hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (Sasaran RPJMD)			T2: Indikator Tujuan 2: Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah yang mendapat Dukungan Pembangunan Kewenangan Kabupaten/Kota (IKK Baru 8)			
		S2.1: Sasaran 2: Meningkatnya aset tanah pemerintah yang berkepastian hukum		S2.1: Indikator Sasaran 2: Ditetapkannya Hak Atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah (IKK OUTCOME TANAH 7)			
			OC2.1.1: Meningkatnya kinerja layanan pengamanan aset tanah pemerintah daerah	OC2.1.1: Persentase luas aset tanah Pemerintah Kota yang bersengketa dan diselesaikan melalui mediasi	2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Kabid	
			OT2.1.1.1: Terselesaikannya sengketa dan konflik pertanahan masyarakat	OT2.1.1.1: Terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertipikat yang dilakukan melalui mediasi (IKK Outcome Tanah 5)	2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	JF	
			OS2.1.1.1.1: Terlaksananya Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	OS2.1.1.1.1: Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan	2.10.04.2.01.0004 Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Staf	
			OC2.1.2: Meningkatnya kinerja layanan pengamanan aset tanah pemerintah daerah	OC2.1.2: Persentase aset tanah pmda yang ditindaklanjuti pengamanannya	2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Kabid	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				OT2.1.2.1: Terselaikannya Pembayaran ganti kerugian Tanah untuk Pembangunan	OT2.1.2.1: Persentase bidang tanah yang telah dibayarkan ganti ruginya dibandingkan dengan total bidang tanah yang direncanakan dalam tahun berjalan	2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	JF
				OS2.1.2.1.1: Terlaksananya Koordinasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	OS2.1.2.1.1: Jumlah laporan koordinasi penyelesaian permasalahan ganti kerugian dan santunan tanah	2.10.05.2.01.0003 Koordinasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Staf
				OS2.1.2.1.2: Terselaikannya Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	OS2.1.2.1.2: Jumlah laporan penyelesaian santunan tanah untuk pembangunan	2.10.05.2.01.0004 Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Staf
				OS2.1.2.1.3: Terselaikannya permasalahan Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	OS2.1.2.1.3: Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan	2.10.05.2.01.0005 Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Staf
			OC2.1.3: Optimalisasi Pelayanan Penetapan Tanah untuk Pembangunan Fasilitas Umum		OC2.1.3: Persentase Penetapan Tanah untuk Pembangunan Fasilitas Umum	2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Kabid
				OT2.1.3.1: Tersedianya Lahan yang siap bangun	OT2.1.3.1: Jumlah Surat Keputusan Penetapan Lokasi	2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	JF
				OS2.1.3.1.1: Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	OS2.1.3.1.1: Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota	2.10.10.2.01.0004 Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Staf

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			OC2.1.4: Terwujudnya pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah BA rakortek		OC2.1.4: 1. Jumlah bidang tanah yang didistribusi 2. Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria Indikator Rakortekbang	2.10.06 Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Kabid
				OT2.1.4.1: Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pemanfaatan redistribusi tanah dan penataan aset reforma agraria	OT2.1.4.1: Luas tanah yang ditetapkan menjadi Tanah Objek Landreform dari Tanah Kelebihan maksimum/ Absentee dan jumlah subjek yang ditetapkan pada tahun anggaran (IKK Outcome Tanah 1)	2.10.06.2.01 Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	JF
				OS2.1.4.1.1: Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	OS2.1.4.1.1: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	2.10.06.2.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Staf
				OS2.1.4.1.2: Terlaksananya Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	OS2.1.4.1.2: Jumlah laporan Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria.	2.10.06.2.01.0006 Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	Staf

Tabel 4.1 tersebut menunjukkan keterkaitan yang kuat antara sasaran strategis RPJMD, NSPK, dan program/kegiatan/subkegiatan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan. Setiap tahapan dari tujuan hingga output tersusun hierarkis dan saling mendukung. Program teknis berfokus pada penyediaan/perbaikan hunian dan penataan lingkungan, sedangkan program penunjang memperkuat tata kelola, akuntabilitas, dan pengelolaan aset. Sinergi ini memastikan pencapaian tujuan RPJMD secara terukur, berkelanjutan, dan sesuai standar pelayanan minimal.

Keterkaitan Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Keterkaitan Vertikal yang Jelas

Sasaran RPJMD ke-6 yaitu Meningkatnya layanan hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan dijabarkan ke sasaran perangkat daerah menjadi Sasaran 1 Meningkatnya Aksesibilitas dan Keterjangkauan Sarana Prasarana Permukiman, serta Sasaran 2 Meningkatnya aset tanah pemerintah yang berkepastian hukum kemudian diterjemahkan menjadi *outcome* kunci seperti:

- Penurunan jumlah rumah tidak layak huni (RTLH).
- Pemenuhan rumah bagi korban bencana dan relokasi program pemerintah.
- Peningkatan wilayah permukiman terlayani PSU.
- Penurunan luas kawasan kumuh.
- Pengamanan aset tanah pemerintah.

Outcome tersebut diturunkan lagi ke *output* dan indikator spesifik yaitu jumlah rumah yang direhabilitasi, dokumen data lahan potensial, panjang jalan lingkungan yang layak, dll yang menjadi dasar perencanaan program dan kegiatan.

2. Konsistensi dengan NSPK dan Kewenangan Daerah

Seluruh program utama yaitu Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, Program Pengembangan Perumahan, Program Kawasan Permukiman, dan Program Peningkatan PSU telah sesuai dengan NSPK nasional dan kewenangan pemerintah

kabupaten/kota di bidang perumahan, permukiman, serta pertanahan. Kegiatan seperti Perbaikan RTLH, Pembangunan Rumah Baru Layak Huni, Penataan Kawasan Kumuh, dan Pendataan Lahan Potensial mendukung pemenuhan SPM serta RPJMN/RPJPN.

3. Pendukung Akuntabilitas dan Tata Kelola

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (perencanaan, penganggaran, keuangan, kepegawaian, administrasi umum, dan pengelolaan aset) memastikan kualitas tata kelola, mendukung nilai SAKIP, IKM, dan penyediaan sarana-prasarana penunjang. Subkegiatan seperti penyusunan RKA/DPA, walidata statistik sektoral, pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah, serta penyediaan jasa penunjang menjamin kelancaran operasional perangkat daerah.

4. Sinergi Lintas Bidang

Kegiatan PSU (peningkatan jalan lingkungan, penyediaan sarana prasarana) terhubung langsung dengan program penataan kawasan kumuh dan perbaikan RTLH. Data dan informasi lahan relokasi mendukung pembangunan rumah baru dan rehabilitasi bagi korban bencana serta meminimalkan sengketa aset tanah. Pengelolaan rusunawa dan rumah khusus berkontribusi terhadap aksesibilitas hunian bagi MBR dan masyarakat terdampak relokasi.

5. Penguatan *Outcome* dan Dampak

Kegiatan berorientasi pada dampak nyata: berkurangnya permukiman kumuh, meningkatnya akses PSU, terjaminnya hunian layak bagi korban bencana, dan meningkatnya kepastian hukum aset tanah. Adanya indikator kuantitatif (persentase, jumlah unit, panjang jalan) memungkinkan evaluasi kinerja yang objektif dan akuntabel.

Selanjutnya Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan disajikan pada Tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 4. 2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan Dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOM E/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPU T	Satuan	BASE LINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						42,711,3 97,784		44,357,4 77,784		44,308,0 77,784		44,894,3 97,784		46,071,6 37,784	
1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						8,795,58 1,784		8,795,58 1,784		8,710,58 1,784		8,710,58 1,784		8,710,58 1,784	
1. Meningkatkan penguatan internal akuntabilitas kinerja	1. Persentase LHE AKIP yang ditindaklanjuti	persen	100%	100 %	100%	7,434,06 0,239	100%	7,434,06 0,239	100%	7,434,06 0,239	100%	7,434,06 0,239	100%	7,434,06 0,239	Sekre taris
2. Meningkatkan layanan kesekretariatan	2. Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Index	0	0	90	1,361,52 1,545	90.1	1,361,52 1,545	90	1,276,52 1,545	90	1,276,52 1,545	90	1,276,52 1,545	Sekre taris
1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						19,000,0 00		19,000,0 00		19,000,0 00		19,000,0 00		19,000,0 00	
Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	Dokum en	16	16	16	19,000,0 00	16	19,000,0 00	16	19,000,0 00	16	19,000,0 00	16	19,000,0 00	Kasub ag PRK
1.04.01.2.01.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						0		0		0		0		0	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokum en	3	3	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	Staf
1.04.01.2.01.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						0		0		0		0		0	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOM E/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPU T	Satuan	BASE LINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dokum en	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	Staf
1.04.01.2.01.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						0		0		0		0		0	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Dokum en	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	Staf
1.04.01.2.01.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						0		0		0		0		0	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Dokum en	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	Staf
1.04.01.2.01.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						0		0		0		0		0	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Dokum en	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	Staf

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOM E/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPU T	Satuan	BASE LINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.04.01.2.01.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						2,000,000		2,000,000		2,000,000		2,000,000		2,000,000	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lapora n	1	1	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	Staf
1.04.01.2.01.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2,000,000		2,000,000		2,000,000		2,000,000		2,000,000	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lapora n	4	4	4	2,000,000	4	2,000,000	4	2,000,000	4	2,000,000	4	2,000,000	Staf
1.04.01.2.01.8 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						5,000,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000	
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokum en	1	1	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	Staf
1.04.01.2.01.9 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000	
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	1	1	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	Staf
1.04.01.2.01.11 Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD						0		0		0		0		0	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOM E/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPU T	Satuan	BASE LINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Dokum en	2	2	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	Staf
1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						7,415,06 0,239		7,415,06 0,239		7,415,06 0,239		7,415,06 0,239		7,415,06 0,239	
Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan sesuai SAP	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan sesuai SAP	Dokum en	1	1	1	7,415,06 0,239	1	7,415,06 0,239	1	7,415,06 0,239	1	7,415,06 0,239	1	7,415,06 0,239	Kasub ag PRK
1.04.01.2.02.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						5,807,974 ,239		5,807,974 ,239		5,807,974 ,239		5,807,974 ,239		5,807,974 ,239	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	62	62	62	5,807,974 ,239	62	5,807,974 ,239	62	5,807,974 ,239	62	5,807,974 ,239	62	5,807,974 ,239	Staf
1.04.01.2.02.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						1,607,086 ,000		1,607,086 ,000		1,607,086 ,000		1,607,086 ,000		1,607,086 ,000	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokum en	24	24	24	1,607,086 ,000	24	1,607,086 ,000	24	1,607,086 ,000	24	1,607,086 ,000	24	1,607,086 ,000	Staf
1.04.01.2.02.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						0		0		0		0		0	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lapora n	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	Staf
1.04.01.2.02.7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						0		0		0		0		0	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOM E/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPU T	Satuan	BASE LINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulana n/ Semesteran SKPD	Dokum en	12	12	12	0	12	0	12	0	12	0	12	0	Staf
1.04.01.2.02.8 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						0		0		0		0		0	
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokum en	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	Staf
1.04.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						345,379,155		345,379,155		310,379,155		310,379,155		310,379,155	
Meningkatnya kinerja dan kompetensi ASN	Nilai IP ASN Perangkat Daerah	nilai	Cuku p	Baik	Sangat Baik	345,379,155	Sangat Baik	345,379,155	Sangat Baik	310,379,155	Sangat Baik	310,379,155	Sangat Baik	310,379,155	Kasub ag Umpe g
1.04.01.2.05.1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai						5,000,000		5,000,000		0		0		0	
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	unit	3	3	3	5,000,000	3	5,000,000	3	0	3	0	3	0	Staf
1.04.01.2.05.2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						25,000,000		25,000,000		0		0		0	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	1	1	25,000,000	1	25,000,000	1	0	1	0	1	0	Staf

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOM E/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPU T	Satuan	BASE LINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.04.01.2.05.5 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						5,000,000		5,000,000		0		0		0	
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokum en	1	1	1	5,000,000	1	5,000,000	1	0	1	0	1	0	Staf
1.04.01.2.05.9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						210,379,1 55		210,379,1 55		210,379,1 55		210,379,1 55		210,379,1 55	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pegawa i	0	0	10	210,379,1 55	10	210,379,1 55	10	210,379,1 55	10	210,379,1 55	10	210,379,1 55	Staf
1.04.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						100,000,0 00		100,000,0 00		100,000,0 00		100,000,0 00		100,000,0 00	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	0	8	100,000,0 00	24	100,000,0 00	24	100,000,0 00	24	100,000,0 00	24	100,000,0 00	Staf
1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah						138,745, 820		138,745, 820		138,745, 820		138,745, 820		138,745, 820	
Tersedianya layanan administrasi umum dan jasa penunjang	Jumlah ASN yang terlayani	orang/ bulan	56	56	56	138,745, 820	56	138,745, 820	56	138,745, 820	56	138,745, 820	56	138,745, 820	Kasub ag Umpe g
1.04.01.2.06.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						3,984,200		3,984,200		3,984,200		3,984,200		3,984,200	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	3,984,200	1	3,984,200	1	3,984,200	1	3,984,200	1	3,984,200	Staf

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOM E/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPU T	Satuan	BASE LINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.04.01.2.06.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor						37,921,38 0		37,921,38 0		37,921,38 0		37,921,38 0		37,921,38 0	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	37,921,38 0	1	37,921,38 0	1	37,921,38 0	1	37,921,38 0	1	37,921,38 0	Staf
1.04.01.2.06.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						6,472,040		6,472,040		6,472,040		6,472,040		6,472,040	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	1	6,472,040	1	6,472,040	1	6,472,040	1	6,472,040	1	6,472,040	Staf
1.04.01.2.06.9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						85,368,20 0		85,368,20 0		85,368,20 0		85,368,20 0		85,368,20 0	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lapora n	8	8	8	85,368,20 0	8	85,368,20 0	8	85,368,20 0	8	85,368,20 0	8	85,368,20 0	Staf
1.04.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						5,000,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokum en	1	1	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	Staf
1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						260,638,930		260,638,930		210,638,930		210,638,930		210,638,930	
Terkelolanya Pendataan barang Milik Daerah	Jumlah barang yang terinventarisasi	Unit	10	11	13	260,638,930	13	260,638,930	13	210,638,930	13	210,638,930	13	210,638,930	Kasub ag Umpe g
1.04.01.2.07.1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						50,000,00 0		50,000,00 0		50,000,00 0		50,000,00 0		50,000,00 0	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOM E/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPU T	Satuan	BASE LINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	0	0	1	50,000,00 0	1	50,000,00 0	1	50,000,00 0	1	50,000,00 0	1	50,000,00 0	Staf
1.04.01.2.07.2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						50,000,00 0		50,000,00 0		0		0		0	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	0	0	1	50,000,00 0	1	50,000,00 0	1	0	1	0	1	0	Staf
1.04.01.2.07.5 Pengadaan Mebel						54,535,13 0		54,535,13 0		54,535,13 0		54,535,13 0		54,535,13 0	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	1	1	54,535,13 0	1	54,535,13 0	1	54,535,13 0	1	54,535,13 0	1	54,535,13 0	Staf
1.04.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						106,103,8 00		106,103,8 00		106,103,8 00		106,103,8 00		106,103,8 00	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	10	10	10	106,103,8 00	10	106,103,8 00	10	106,103,8 00	10	106,103,8 00	10	106,103,8 00	Staf
1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						256,439, 500		256,439, 500		256,439, 500		256,439, 500		256,439, 500	
Tersedianya layanan jasa penunjang	Otomatis ditarik dari indikator subkegiatan yang digunakan Persentase layanan jasa penunjang yang tersedia	paket	0	0	2	256,439, 500	2	256,439, 500	2	256,439, 500	2	256,439, 500	2	256,439, 500	Kasub ag Umpe g
1.04.01.2.08.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat						3,000,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOM E/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPU T	Satuan	BASE LINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lapora n	1	1	1	3,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000	Staf
1.04.01.2.08.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						240,000,0 00		240,000,0 00		240,000,0 00		240,000,0 00		240,000,0 00	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lapora n	12	12	12	240,000,0 00	12	240,000,0 00	12	240,000,0 00	12	240,000,0 00	12	240,000,0 00	Staf
1.04.01.2.08.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						13,439,50 0		13,439,50 0		13,439,50 0		13,439,50 0		13,439,50 0	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lapora n	12	12	12	13,439,50 0	12	13,439,50 0	12	13,439,50 0	12	13,439,50 0	12	13,439,50 0	Staf
1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						360,318, 140		360,318, 140		360,318, 140		360,318, 140		360,318, 140	
Terkelolanya Pendataan barang Milik Daerah	Jumlah barang yang terinventarisasi	paket	15	15	15	360,318, 140	15	360,318, 140	15	360,318, 140	15	360,318, 140	15	360,318, 140	Kasub ag Umpe g
1.04.01.2.09.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						5,000,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kendar aan	14	14	14	5,000,000	14	5,000,000	14	5,000,000	14	5,000,000	14	5,000,000	Staf
1.04.01.2.09.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						52,898,34 0		52,898,34 0		52,898,34 0		52,898,34 0		52,898,34 0	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOM E/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPU T	Satuan	BASE LINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kendar aan	3	3	3	52,898,34 0	3	52,898,34 0	3	52,898,34 0	3	52,898,34 0	3	52,898,34 0	Staf
1.04.01.2.09.5 Pemeliharaan Mebel						5,000,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000	
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	0	25	5,000,000	25	5,000,000	25	5,000,000	25	5,000,000	25	5,000,000	Staf
1.04.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						276,509,8 00		276,509,8 00		276,509,8 00		276,509,8 00		276,509,8 00	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabi litasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabi litasi	Unit	5	5	5	276,509,8 00	5	276,509,8 00	5	276,509,8 00	5	276,509,8 00	5	276,509,8 00	Staf
1.04.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						20,910,00 0		20,910,00 0		20,910,00 0		20,910,00 0		20,910,00 0	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabi litasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabi litasi	unit	10	10	10	20,910,00 0	10	20,910,00 0	10	20,910,00 0	10	20,910,00 0	10	20,910,00 0	Staf
1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN						1,075,57 6,000		725,576, 000		725,576, 000		725,576, 000		725,576, 000	
Pemenuhan rumah bagi korban bencana dan terdampak program pemerintah	1. Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh	Persen	80.95 %	100 %	100%	1,075,57 6,000	100%	725,576, 000	100%	725,576, 000	100%	725,576, 000	100%	725,576, 000	Kabid

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOM E/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPU T	Satuan	BASE LINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	rumah layak huni (IKK Outcome 1.d.1)														
	2. Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (IKK Outcome 1.d.2)	Persen	0	100 %	100%		100%		100%		100%		100%		
1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota						350,000, 000		0		0		0		0	
Tersedianya data dan informasi lahan potensial yang aman, sesuai ruang dan layak secara sosial-ekonomi sebagai lokasi relokasi perumahan	Jumlah dokumen database rumah terdampak bencana atau program relokasi	Dokum en	0		1	350,000, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	JF
1.04.02.2.01.0002 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan						100,000,0 00		0		0		0		0	
Tersusunnya Dokumen Data Lahan Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah lokasi lahan potensial yang teridentifikasi dan terdokumentasi	Dokum en	0	0	1	100,000,0 00	0	0	0	0	0	0	0	0	Staf
1.04.02.2.01.0006 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus						100,000,0 00		0		0		0		0	
Tersusunnya Dokumen Data Rumah Sewa Milik	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat,	Dokum en	0	0	1	100,000,0 00	0	0	0	0	0	0	0	0	Staf

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOM E/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPU T	Satuan	BASE LINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Rumah Susun, dan Rumah Khusus														
1.04.02.2.01.0009 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota						150,000,0 00			-		-		-		-
Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	0	0	0	1	150,000,0 00	-	-	-	-	-	-	-	-	Staf
1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota						230,000, 000		230,000, 000		230,000, 000		230,000, 000		230,000, 000	
Tersedianya data dan informasi lahan potensial yang aman, sesuai ruang dan layak secara sosial-ekonomi sebagai lokasi relokasi perumahan	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Unit Rumah	17	36	40	230,000, 000	40	230,000, 000	40	230,000, 000	40	230,000, 000	40	230,000, 000	JF
1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana						200,000,0 00		200,000,0 00		200,000,0 00		200,000,0 00		200,000,0 00	
Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Unit Rumah	17	36	40	200,000,0 00	40	200,000,0 00	40	200,000,0 00	40	200,000,0 00	40	200,000,0 00	Staf
1.04.02.2.03.0008 Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota						30,000,00 0		30,000,00 0		30,000,00 0		30,000,00 0		30,000,00 0	
Terfasilitasinya Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah	Rumah Tangga	0	0	5	30,000,00 0	1	30,000,00 0	1	30,000,00 0	1	30,000,00 0	1	30,000,00 0	Staf

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOM E/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPU T	Satuan	BASE LINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus						495,576,000		495,576,000		495,576,000		495,576,000		495,576,000	
Meningkatnya aksesibilitas dan keterjangkauan rusus dan rusunawa	1. PAD urusan rusus dan rusunawa				1,374,600,000	495,576,000	1,374,600,000	495,576,000	1,374,600,000	495,576,000	1,374,600,000	495,576,000	1,374,600,000	495,576,000	Kepala UPTD
	2. jumlah rusus yang layak dan memadai	unit	113	139	140		145		150		155		160		
	3. jumlah rusunawa yang layak dan memadai	unit	135	151	160		165		170		175		180		
1.04.02.2.05.0008 Operasional dan Pemeliharaan Rumah Susun yang merupakan aset pemerintah kabupaten/kota						495,576,000		495,576,000		495,576,000		495,576,000		495,576,000	
Terlaksananya operasional dan pemeliharaan rumah susun yang merupakan aset pemerintah kabupaten/kota	Jumlah Tanah dan/atau Bangunan Milik Bersama yang menjadi bagian rumah susun yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	TB	2	2	2	495,576,000	2	495,576,000	2	495,576,000	2	495,576,000	2	495,576,000	Staf
1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN						6,328,000,000		6,178,000,000		5,178,000,000		1,528,000,000		1,178,000,000	
Menurunnya luas kawasan kumuh	Persentase Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (IKK Outcome 1.d.3)	persen	41,66 %	18.79%	34.36%	6,328,000,000	50.21%	6,178,000,000	66.35%	5,178,000,000	82.76%	1,528,000,000	100.00%	1,178,000,000	Kabid
1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						160,000,000		10,000,000		10,000,000		360,000,000		10000000	
Terlaksananya kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan	Luas kawasan kumuh dengan Luas Di bawah 10 Ha yang ditangani	ha	35.33	6.64	5.5	160,000,000	5.6	10,000,000	5.7	10,000,000	5.8	360,000,000	6.09	10000000	JF

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOM E/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPU T	Satuan	BASE LINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha sesuai standar teknis															
1.04.03.2.02.0008 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP						150,000,000		0		0		350,000,000		0	
Tersusun/Tereview/Terlegalisasinya Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	dokumen	0	0	1	150,000,000	0	0	0	0	2	350,000,000	0	0	Staf
1.04.03.2.02.0014 Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh						10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000	
Terlaksananya Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survey dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	dokumen	1	1	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	Staf
1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						6,168,000,000		6,168,000,000		5,168,000,000		1,168,000,000		1,168,000,000	
Terlaksananya kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha sesuai standar teknis	Luas kawasan kumuh dengan Luas Di bawah 10 Ha yang ditangani	Ha	35.33	6.64	5.5	6,168,000,000	5.6	6,168,000,000	5.7	5,168,000,000	5.8	1,168,000,000	6,09	1,168,000,000	JF
1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni						1,000,000,000		1,000,000,000		1,000,000,000		500,000,000		500,000,000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOM E/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPU T	Satuan	BASE LINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit Rumah	203	193	183	1,000,000 ,000	173	1,000,000 ,000	163	1,000,000 ,000	153	500,000,0 00	143	500,000,0 00	Staf
1.04.03.2.03.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran /Peremajaan Permukiman Kumuh						168,000,0 00		168,000,0 00		168,000,0 00		168,000,0 00		168,000,0 00	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremaja an Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran /Peremajaan Permukiman Kumuh	Lapora n	1	0	2	168,000,0 00	2	168,000,0 00	2	168,000,0 00	2	168,000,0 00	2	168,000,0 00	Staf
1.04.03.2.03.0013 Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh						5,000,000 ,000		5,000,000 ,000		4,000,000 ,000		500,000,0 00		500,000,0 00	
Terlaksananya Pemugaran di Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	Ha	1,82	1,82	1,90	5,000,000 ,000	4,19	5,000,000 ,000	2,02	4,000,000 ,000	0,63	500,000,0 00	2	500,000,0 00	Staf
1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH						5,870,00 0,000		5,470,00 0,000		5,870,00 0,000		5,470,00 0,000		5,470,00 0,000	
Menurunnya Jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni (LPPD)	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani (IKK Outcome 1.d.4)	Persen	2.40 %	2.52 %	2.78%	5,870,00 0,000	3.03%	5,470,00 0,000	3.29%	5,870,00 0,000	3.54%	5,470,00 0,000	3.79%	5,470,00 0,000	Kabid
1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota						5,870,00 0,000		5,470,00 0,000		5,870,00 0,000		5,470,00 0,000		5,470,00 0,000	
Terselenggaranya Rehabilitasi terhadap Rumah tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Direhabilitasi	Unit Rumah	1. 203 2. 2188	1. 193 2. 2099	1. 183 2. 1909	5,870,00 0,000	1. 173 2. 1719	5,470,00 0,000	1. 163 2. 1529	5,870,00 0,000	1. 153 2. 1339	5,470,00 0,000	1. 143 2. 1149	5,470,00 0,000	JF
1.04.04.2.01.0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya						4,600,000 ,000		4,200,000 ,000		4,600,000 ,000		4,200,000 ,000		4,200,000 ,000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOM E/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPU T	Satuan	BASE LINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha															
Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Unit Rumah	122	99	200	4,600,000,000	200	4,200,000,000	200	4,600,000,000	200	4,200,000,000	200	4,200,000,000	Staf
1.04.04.2.01.0004 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru						1,250,000,000		1,250,000,000		1,250,000,000		1,250,000,000		1,250,000,000	
Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Unit Rumah	0	0	9	1,250,000,000	9	1,250,000,000	9	1,250,000,000	9	1,250,000,000	9	1,250,000,000	Staf
1.04.04.2.01.0007 Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru						20,000,000.00		20,000,000.00		20,000,000.00		20,000,000.00		20,000,000.00	
Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh	Laporan	1	1	1	20,000,000.00	1	20,000,000.00	1	20,000,000.00	1	20,000,000.00	1	20,000,000.00	Staf

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOM E/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPU T	Satuan	BASE LINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	dan Permukiman Kumuh Baru														
1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)						20,642,2 40,000		23,188,3 20,000		23,823,9 20,000		28,460,2 40,000		29,987,4 80,000	
Meningkatnya wilayah permukiman terlayani PSU dasar	Persentase jalan lingkungan yang layak	Persen	22.86 %	26.7 6%	30.66%	20,642,2 40,000	34.56%	23,188,3 20,000	38.46%	23,823,9 20,000	42.36%	28,460,2 40,000	46.26%	29,987,4 80,000	Kabid
1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan						20,642,2 40,000		23,188,3 20,000		23,823,9 20,000		28,460,2 40,000		29,987,4 80,000	
1. Terlaksananya peningkatan jalan lingkungan permukiman sesuai rencana teknis	1. Panjang jalan lingkungan yang layak	meter	1165 35	1364 07	156282	19,722,2 40,000	176157	22,138,3 20,000	196037	22,773,9 20,000	215917	27,410,2 40,000	235797	28,937,4 80,000	JF
2. Terlaksananya operasional PSU Perumahan	2. Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (IKK Outcome 1.d.5)	Persen	5.10 %	5.62 %	6.10%	920,000, 000	6.57%	1,050,00 0,000	7.04%	1,050,00 0,000	7.66%	1,050,00 0,000	7.96%	1,050,00 0,000	JF
1.04.05.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan						50,000,00 0		50,000,00 0		50,000,00 0		50,000,00 0		50,000,00 0	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Lapora n	1	1	3	50,000,00 0	3	50,000,00 0	3	50,000,00 0	3	50,000,00 0	3	50,000,00 0	Staf
1.04.05.2.01.0011 Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan						870,000,0 00		1,000,000 ,000		1,000,000 ,000		1,000,000 ,000		1,000,000 ,000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOM E/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPU T	Satuan	BASE LINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	Lokasi	0	4	5	870,000,0 00	5	1,000,000 ,000	5	1,000,000 ,000	5	1,000,000 ,000	5	1,000,000 ,000	Staf
1.04.05.2.01.0010 Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang						30,000,00 0		30,000,00 0		30,000,00 0		30,000,00 0		30,000,00 0	
Terlaksananya Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	Lapora n	1	1	1	30,000,00 0	1	30,000,00 0	1	30,000,00 0	1	30,000,00 0	1	30,000,00 0	Staf
1.04.05.2.01.0012 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan						19,692,24 0,000		22,108,32 0,000		22,743,92 0,000		27,380,24 0,000		28,907,48 0,000	
Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	RT	447	447	447	19,692,24 0,000	447	22,108,32 0,000	447	22,743,92 0,000	447	27,380,24 0,000	447	28,907,48 0,000	Staf
2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						3,861,07 8,028		2,214,99 8,028		2,264,39 8,028		1,678,07 8,028		500,838, 028	
2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN						25,000,0 00		25,000,0 00		25,000,0 00		25,000,0 00		25,000,0 00	
Meningkatnya kinerja layanan pengamanan aset tanah pemerintah daerah	Persentase luas aset tanah Pemerintah Kota yang bersengketa dan diselesaikan melalui mediasi	persen	3.38 %	6.54 %	9.50%	25,000,0 00	12.28%	25,000,0 00	14.89%	25,000,0 00	17.35%	25,000,0 00	19.68%	25,000,0 00	Kabid
2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota						25,000,0 00		25,000,0 00		25,000,0 00		25,000,0 00		25,000,0 00	
Terselesaikannya sengketa dan	Terselesaikannya kasus tanah garapan belum	Persen	100%	100 %	100%	25,000,0 00	100%	25,000,0 00	100%	25,000,0 00	100%	25,000,0 00	100%	25,000,0 00	JF

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOM E/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPU T	Satuan	BASE LINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
konflik pertanahan masyarakat	bersertipikat yang dilakukan melalui mediasi (IKK Outcome Tanah 5)														
2.10.04.2.01.0004 Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						25,000,00 0		25,000,00 0		25,000,00 0		25,000,00 0		25,000,00 0	
Terlaksananya Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan	Berita Acara	5	5	3	25,000,00 0	3	25,000,00 0	3	25,000,00 0	3	25,000,00 0	3	25,000,00 0	Staf
2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN						3,791,07 8,028		2,144,99 8,028		2,194,39 8,028		1,608,07 8,028		430,838, 028	
Meningkatnya kinerja layanan pengamanan aset tanah pemerintah daerah	Persentase aset tanah pemda yang ditindaklanjuti pengamanannya	Persen	76.58 %	77.5 8%	78.77%	3,791,07 8,028	79.67%	2,144,99 8,028	86.28%	2,194,39 8,028	87.39%	1,608,07 8,028	90.01%	430,838, 028	Kabid
2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						3,791,07 8,028		2,144,99 8,028		2,194,39 8,028		1,608,07 8,028		430,838, 028	
Terselesaikannya Pembayaran ganti kerugian Tanah untuk Pembangunan	Persentase bidang tanah yang telah dibayarkan ganti ruginya dibandingkan dengan total bidang tanah yang direncanakan dalam tahun berjalan	Persen	100%	100	100%	3,791,07 8,028	100%	2,144,99 8,028	100%	2,194,39 8,028	100%	1,608,07 8,028	0	430,838, 028	JF
2.10.05.2.01.0003 Koordinasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						50,995,70 0		50,995,70 0		50,995,70 0		50,995,70 0		50,995,70 0	
Terlaksananya Koordinasi	Jumlah laporan koordinasi	Lapora n	2	2	2	50,995,70 0	2	50,995,70 0	2	50,995,70 0	2	50,995,70 0	2	50,995,70 0	Staf

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOM E/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPU T	Satuan	BASE LINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	penyelesaian permasalahan ganti kerugian dan santunan tanah														
2.10.05.2.01.0004 Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						1,000,000,000		500,000,000		300,000,000		300,000,000		0	
Terselesaikannya Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyelesaian santunan tanah untuk pembangunan	Lapora n	0	1	1	1,000,000,000	1	500,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	1	0	Staf
2.10.05.2.01.0005 Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						2,740,082,328		1,594,002,328		1,843,402,328		1,257,082,328		379,842,328	
Terselesaikannya permasalahan Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan	Lapora n	1	1	1	2,740,082,328	1	1,594,002,328	1	1,843,402,328	1	1,257,082,328	1	379,842,328	Staf
2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE						10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000	
Terwujudnya pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah	1. Jumlah bidang tanah yang didistribusi 2. Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria	Dokum en	0	0	1. 12 2. 17	10,000,000	1. 12 2. 17	10,000,000	1. 12 2. 17	10,000,000	1. 12 2. 17	10,000,000	1. 12 2. 17	10,000,000	Kabid

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOM E/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPU T	Satuan	BASE LINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
ini yang di BA rakortek	Indikator Rakortekbang														
2.10.06.2.01 Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota						10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000	
Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pemanfaatan redistribusi tanah dan penataan aset reforma agraria	Luas tanah yang ditetapkan menjadi Tanah Objek Landreform dari Tanah Kelebihan Absentee dan jumlah subjek yang ditetapkan pada tahun anggaran (IKK Outcome Tanah 1)	persen	0	0	100%	10,000,000	100%	10,000,000	100%	10,000,000	100%	10,000,000	100%	10,000,000	JF
2.10.06.2.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota						5,000,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Laporan	0	0	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	Staf
2.10.06.2.01.0006 Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria						5,000,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000	
Terlaksananya Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	Jumlah laporan Koordinasi dalam rangka Penataan	Laporan	0	0	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	Staf

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOM E/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPU T	Satuan	BASE LINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Aset Reforma Agraria.														
2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH						35,000,0 00		35,000,0 00		35,000,0 00		35,000,0 00		35,000,0 00	
Optimalisasi Pelayanan Penetapan Tanah untuk Pembangunan Fasilitas Umum	Persentase Penetapan Tanah untuk Pembangunan Fasilitas Umum	persen	100%	100 %	100%	35,000,0 00	100%	35,000,0 00	100%	35,000,0 00	100%	35,000,0 00	100%	35,000,0 00	Kabid
2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota						35,000,0 00		35,000,0 00		35,000,0 00		35,000,0 00		35,000,0 00	
Tersedianya Lahan yang siap bangun	Jumlah Surat Keputusan Penetapan Lokasi	Dokum en	5	8	8	35,000,0 00	8	35,000,0 00	8	35,000,0 00	8	35,000,0 00	8	35,000,0 00	JF
2.10.10.2.01.0004 Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota						35,000,00 0		35,000,00 0		35,000,00 0		35,000,00 0		35,000,00 0	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Dokum en	5	13	15	35,000,00 0	15	35,000,00 0	15	35,000,00 0	15	35,000,00 0	15	35,000,00 0	Staf
						46,572,4 75,812		46,572,4 75,812		46,572,4 75,812		46,572,4 75,812		46,572,4 75,812	

4.1 Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan

Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan pada Tabel 4.2 dapat disimpulkan sebagai berikut:

Rencana program prioritas urusan perumahan dan permukiman yang akan dilaksanakan adalah:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja individu ASN Kota Tarakan dengan memperkuat internal akuntabilitas kinerja dan meningkatkan kualitas layanan kesekretariatan DPRKPP Kota Tarakan, melalui kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian perangkat daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Melalui program ini ditargetkan untuk nilai atau predikat SAKIP DPRKPP bisa mempertahankan predikat A dengan nilai yang diharapkan terus meningkat tiap tahunnya. Predikat SAKIP DPRKPP ini menggambarkan hasil dan dampak nyata dari kegiatan yang dilakukan oleh DPRKPP terhadap masyarakat.

Agar supaya kegiatan yang dilakukan oleh DRPKPP dapat dilihat hasil dan dampak nyatanya oleh masyarakat, maka program ini juga merupakan nomenklatur program dari salah satu program unggulan Wali Kota, yaitu program nomor 9 program perbaikan kesejahteraan ASN, Tenaga Honor, Pensiunan, Kader Dasa Wisma dan Posyandu, melalui Jaminan kelancaran pembayaran tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) dan uang lauk pauk (ULP) untuk ASN serta untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja (P3K) lingkup Pemerintah Kota Tarakan sesuai kemampuan daerah.

b. Program Pengembangan Perumahan

Program ini dimaksudkan untuk mendukung dalam peningkatan layanan hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan dengan pemenuhan mutu pelayanan bagi korban bencana dan terdampak pemerintah, melalui kegiatan pendataan rumah masyarakat yang lokasinya merupakan area rawan bencana dan area yang bisa digunakan untuk melakukan relokasi korban bencana maupun yang terdampak program pemerintah. Selain itu, juga melalui kegiatan rehabilitasi rumah bagi korban bencana, fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota, dan kegiatan operasional dan pemeliharaan rumah susun yang merupakan aset pemerintah kabupaten/kota. Program ini juga merupakan program yang tertagging sebagai program untuk menjawab SPM urusan perumahan permukiman.

Kegiatan rehabilitasi dan fasilitasi korban rawan bencana dan relokasi program pemerintah diarahkan dengan upaya pemberian bantuan sebagai rumah tidak layak huni bagi korban bencana yang sesuai persyaratan, juga dengan memberikan bantuan subsidi sewa bagi masyarakat yang rumah tinggalnya terdampak program relokasi pemerintah.

c. Program Kawasan Permukiman

Program ini dimaksudkan untuk mendukung dalam peningkatan layanan hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan dengan menurunkan luas kawasan kumuh, melalui kegiatan penyusunan dokumen kebijakan tentang PKP, survei lokasi kumuh, perbaikan rumah tidak layak huni, dan pelaksanaan pemugaran kawasan permukiman kumuh.

Kegiatan penyusunan dokumen kebijakan tentang PKP ditargetkan 3 dokumen selama 5 tahun perencanaan, perbaikan rumah tidak layak huni di area kumuh ditargetkan sebesar 150 – 200 unit pertahun berdasarkan data e-rtlh dan kesesuaian persyaratan. Untuk penanganan kawasan kumuh, dalam 5 tahun perencanaan ditargetkan seluas 35,33 ha yang berkolaborasi

dengan dinas lain, melalui upaya perbaikan jalan lingkungan, perbaikan rumah tidak layak huni, penyediaan air minum, perbaikan drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, dan pengamanan kebakaran.

Program ini juga merupakan nomenklatur program dari salah satu program unggulan Wali Kota, yaitu program nomor 06 program pembangunan perumahan untuk masyarakat, melalui kebijakan berpenghasilan rendah (MBR) tanpa uang muka (DP 0%) atau bantuan perbaikan rumah tidak layak huni.

d. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Program ini dimaksudkan untuk mendukung dalam peningkatan layanan hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan dengan menurunkan jumlah unit rumah tidak layak huni, melalui kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni di luar kawasan permukiman kumuh yang ditargetkan 200 unit pertahun, dan pembangunan rumah baru layak huni di luar kawasan permukiman kumuh yang ditargetkan 9 unit pertahun. Kegiatan pembangunan rumah baru layak huni ini merupakan kegiatan untuk mengakomodir hasil rakortekrenbang provinsi dan program prioritas nasional serta harus mempertimbangkan kondisi keuangan daerah. Kedua kegiatan ini bertujuan untuk mencegah bertumbuhnya kumuh baru.

Program ini juga merupakan nomenklatur program dari salah satu program unggulan Wali Kota, yaitu program nomor 06 program pembangunan perumahan untuk masyarakat, melalui kebijakan berpenghasilan rendah (MBR) tanpa uang muka (DP 0%) atau bantuan perbaikan rumah tidak layak huni.

e. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Program ini dimaksudkan untuk mendukung dalam peningkatan layanan hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan dengan meningkatkan wilayah permukiman yang terlayani PSU dasar, melalui kegiatan perbaikan prasarana, sarana, dan utilitas

umum, serta penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan, dan juga verifikasi dan penyerahan PSU perumahan dari pengembang. Fokus utama dari kegiatan ini adalah rehabilitasi jalan lingkungan dan pemeliharaan makam yang menjadi bagian dari PSU permukiman.

Perbaikan jalan lingkungan ditargetkan sebesar 27.000an meter tiap tahun, sedangkan pemeliharaan makam dilakukan sebanyak 5 lokasi pertahunnya. Koordinasi dengan pengembang juga dilakukan pada program ini, agar pendataan dan penyerah terimaan perumahan antara pengembang dan pemerintah bisa terdata dengan baik.

Program ini juga merupakan nomenklatur program dari salah satu program unggulan Wali Kota, yaitu program nomor 05 Program pemberdayaan rukun tetangga melalui dana alokasi khusus 50-200 juta perRT pertahun untuk perbaikan infrastruktur berupa jalan lingkungan

Rencana program prioritas urusan pertanahan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan dengan meningkatkan kinerja layanan pengamanan aset tanah pemerintah daerah, melalui kegiatan mediasi penyelesaian kasus pertanahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota. Fokus utama kegiatan mediasi ini adalah koordinasi penanganan kasus tanah dan inventarisasi kasus pertanahan pemerintah dengan masyarakat. Program ini digunakan untuk menjawab salah satu indikator kunci urusan pertanahan yaitu terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertipikat yang dilakukan melalui mediasi. Kasus sengketa tanah garapan jika dilihat dari tren-nya selama 5 tahun ke belakang, tiap tahunnya dapat diselesaikan 3-5 kasus.

Program ini juga merupakan nomenklatur program dari salah satu program unggulan Wali Kota, yaitu program nomor 13 program penuntasan masalah pertanahan.

b. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan dengan meningkatkan kinerja layanan pengamanan aset tanah pemerintah daerah, melalui kegiatan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Kegiatan ini berfokus pada koordinasi, santunan tanah dan ganti rugi tanah, serta yang paling utama adalah pengamanan tanah.

Program ini juga merupakan nomenklatur program dari salah satu program unggulan Wali Kota, yaitu program nomor 13 program penuntasan masalah pertanahan.

c. Program Redistribusi Tanah dan ganti Rugi Tanah Kelebihan Maksimum dan tanah Absentee

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan aset tanah pemerintah yang berkepastian hukum dengan mewujudkan pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah, melalui koordinasi dan sinkronisasi penataan akses dalam pemanfaatan redistribusi tanah dalam 1 (satu) kabupaten/kota, serta koordinasi dalam rangka penataan aset reforma agraria. Kedua kegiatan ini merupakan kegiatan yang berkolaborasi dengan Badan Pertanahan Negara (BPN) di Tarakan. Program ini juga merupakan program yang menjawab hasil rakortekrenbang provinsi dan program prioritas nasional. Terdapat 12 bidang tanah pemkot yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk lahan pertanian dengan 17 KK penerima akses pemanfaatan lahan pertanian.

d. Program Penatagunaan Tanah

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan dengan meningkatkan kinerja layanan pengamanan aset tanah pemerintah daerah, melalui kegiatan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan penyelenggaraan konsolidasi tanah yang menjadi kewenangan kabupaten/kota. Fokus utama kegiatan

koordinasi ini adalah koordinasi permohonan penunjukan lokasi (SPL) dan penerbitan dokumen surat keterangan penguasaan fisik bidang tanah (SKPFBT).

Koordinasi permohonan penunjukan lokasi merupakan kegiatan verifikasi tanah pemerintah yang digunakan membangun sarana prasarana publik. Ditargetkan tiap tahunnya ada 5 dokumen SPL yang bisa diterbitkan.

Program ini juga merupakan nomenklatur program dari salah satu program unggulan Wali Kota, yaitu program nomor 13 program penuntasan masalah pertanahan

Alokasi anggaran program/kegiatan akan diprioritaskan pada:

1. Lokasi strategis dan kawasan kumuh prioritas untuk mencapai target tahunan RPJMD.
2. Kegiatan seperti rehabilitasi RTLH dan penataan PSU, dengan penetapan *milestone* tahunan untuk memudahkan pengendalian kinerja.
3. Koordinasi lintas sektor dengan OPD teknis lain, kelurahan, dan swasta (CSR) agar capaian *outcome* lebih optimal.

Seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan mengacu pada:

- RPJMD Kota Tarakan 2026–2030.
- NSPK Kementerian PUPR tentang Penanganan Kumuh, PSU, dan Perumahan MBR.
- Permendagri tentang Pedoman Penyusunan Renstra Perangkat Daerah.
- Dokumen tata ruang dan rencana pembangunan lain yang relevan.

4.2 Uraian Subkegiatan Program Prioritas

Subkegiatan (*output*) yang mendukung Program Prioritas (*outcome*) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan terdapat pada Tabel 4.4, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.04.01)

Program ini berperan sebagai pondasi tata kelola seluruh layanan perumahan, permukiman, dan pertanahan. Outcome utamanya adalah penguatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan layanan kesekretariatan. Melalui kegiatan seperti perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, administrasi keuangan, penyediaan logistik dan jasa penunjang, serta pemeliharaan aset kantor, program ini memastikan setiap proses berjalan tertib, transparan, dan efisien. Dengan pengelolaan internal yang baik, kegiatan teknis di lapangan dapat terlaksana lebih efektif dan akuntabel.

2. Program Pengembangan Perumahan (1.04.02)

Fokus utama program ini adalah pemenuhan rumah bagi korban bencana dan masyarakat terdampak relokasi. Rehabilitasi rumah, fasilitasi penyediaan hunian baru, serta pembinaan dan pemeliharaan rusunawa memastikan kelompok rentan memiliki tempat tinggal layak. Kegiatan ini selaras dengan misi pemerintah untuk mengurangi backlog perumahan dan menjaga kualitas hidup masyarakat pascabencana.

3. Program Kawasan Permukiman (1.04.03)

Outcome yang dikejar adalah penurunan luas kawasan kumuh. Penataan, pemugaran, perbaikan RTLH, dan legalisasi kebijakan bidang PKP dilakukan untuk memperbaiki kualitas lingkungan permukiman sekaligus mencegah terbentuknya kawasan kumuh baru. Program ini mendukung pencapaian target RPJMD dalam mempercantik wajah kota dan meningkatkan kualitas layanan dasar.

4. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh (1.04.04)

Program ini menitikberatkan pada penurunan jumlah unit rumah tidak layak huni (RTLH). Kegiatan pencegahan dan perbaikan RTLH di luar kawasan kumuh, serta pembangunan rumah baru layak huni, menutup celah munculnya perumahan kumuh baru. Pendekatan preventif dan kuratif yang diambil

mempercepat penanganan RTLH sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan hunian.

5. Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)(1.04.05)

Outcome yang dituju adalah meningkatnya wilayah permukiman yang terlayani PSU dasar. Penyediaan dan perbaikan PSU seperti jalan lingkungan, drainase, air bersih, dan sanitasi menjadi kunci memastikan kawasan perumahan yang sudah tertangani tetap layak huni dan berkelanjutan.

6. Program Pertanahan: Penyelesaian Sengketa, Ganti Rugi, Redistribusi, dan Penatagunaan Tanah (2.10.04–2.10.10)

Seluruh program pertanahan ini memiliki *outcome* pengamanan aset tanah pemerintah, pemerataan penguasaan tanah, dan optimalisasi penetapan tanah untuk fasilitas umum. Kegiatan mediasi sengketa, penyelesaian santunan/ganti rugi, redistribusi tanah, penataan aset dan akses, serta konsolidasi tanah membantu mencegah konflik sosial, mempercepat proyek strategis, dan menjamin ketersediaan lahan legal untuk perumahan rakyat serta PSU.

Bentuk keterkaitan antara Program Prioritas dengan subkegiatan yang akan menyelaraskan kinerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan adalah sebagai berikut:

- Keterkaitan Vertikal yang Solid

Bahwa Setiap program prioritas memiliki *outcome* yang jelas, dan *outcome* tersebut diwujudkan melalui kegiatan serta subkegiatan yang spesifik. Dari penguatan tata kelola hingga penyediaan rumah dan penataan tanah, seluruh elemen saling mendukung dalam mencapai sasaran RPJMD bidang perumahan dan permukiman.

- Sinergi Program/kegiatan/Subkegiatan Teknis dan Pendukung

Program penunjang menyediakan sistem perencanaan, penganggaran, logistik, dan pemeliharaan yang menjadi motor penggerak. Sementara itu, program teknis dan pertanahan menangani langsung isu di

lapangan, dari RTLH, kawasan kumuh, PSU, hingga konflik pertanahan.

- Fokus pada Dampak Nyata bagi Masyarakat

Penurunan RTLH, pemenuhan hunian pascabencana, dan penataan PSU menunjukkan orientasi hasil yang konkret yaitu meningkatnya kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah, korban bencana, dan warga di kawasan kumuh.

- Penguatan Tata Kelola dan Kepastian Hukum

Program pertanahan dan penunjang menjamin keberlanjutan layanan, kepastian aset, dan keadilan penguasaan tanah, sehingga mencegah hambatan dalam pembangunan perumahan dan permukiman di masa depan.

Seluruh program prioritas Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan bukan hanya berdiri sendiri, tetapi membentuk rantai logis dari kebijakan hingga dampak di lapangan serta mewujudkan kota yang lebih tertata, layak huni, dan berkeadilan.

Tabel 4. 3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas kinerja	1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			1.04.01.2.01.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			1.04.01.2.01.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			1.04.01.2.02.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
		2. Meningkatnya layanan kesekretariatan	1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			1.04.01.2.06.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			1.04.01.2.06.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			1.04.01.2.08.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			1.04.01.2.09.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			1.04.01.2.09.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			1.04.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			1.04.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
2	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pemenuhan rumah bagi korban bencana dan terdampak program pemerintah	1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
			1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	
			1.04.02.2.03.0008 Fasilitas Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	
			1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	
			1.04.02.2.05.0008 Operasional dan Pemeliharaan Rumah Susun yang merupakan aset pemerintah kabupaten/kota	
3	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Menurunnya luas kawasan kumuh	1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
			1.04.03.2.02.0008 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	
			1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
			1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			1.04.03.2.03.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran /Peremajaan Permukiman Kumuh	
			1.04.03.2.03.0013 Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	
4	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Menurunnya Jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni (LPPD)	1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	
			1.04.04.2.01.0001 Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
			1.04.04.2.01.0004 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	
5	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Meningkatnya wilayah permukiman terlayani PSU dasar	1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
			1.04.05.2.01.0011 Perbaiki Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	
			1.04.05.2.01.0012 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	
6	2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Meningkatnya kinerja layanan pengamanan aset tanah pemerintah daerah	2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			2.10.04.2.01.0004 Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
7	2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Meningkatnya kinerja layanan pengamanan aset tanah pemerintah daerah	2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			2.10.05.2.01.0003 Koordinasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			2.10.05.2.01.0004 Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			2.10.05.2.01.0005 Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
8	2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Terwujudnya pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah (BA rakortek)	2.10.06.2.01 Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			2.10.06.2.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	
			2.10.06.2.01.0006 Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	
9	2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Optimalisasi Pelayanan Penetapan Tanah untuk	2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Pembangunan Fasilitas Umum		
			2.10.10.2.01.0004 Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	

4.3 Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan Kota Tarakan di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan menetapkan indikator kinerja utama dan indikator sasaran yang terukur secara kuantitatif maupun kualitatif. Penetapan indikator ini dimaksudkan untuk memastikan keterkaitan antara tujuan, sasaran, program, dan kegiatan dengan target pembangunan daerah serta kebijakan nasional.

Indikator-indikator yang dipilih mencerminkan prioritas pembangunan lima tahun ke depan, antara lain: peningkatan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan; peningkatan cakupan permukiman yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) dasar; penguatan tata kelola kinerja dan pelayanan publik melalui SAKIP serta Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); peningkatan konsolidasi tanah yang didukung oleh pembangunan kewenangan daerah; serta percepatan penetapan hak atas tanah yang menjadi aset pemerintah daerah.

Target capaian indikator ditetapkan secara bertahap dari tahun 2025 hingga 2030 dengan memperhatikan kondisi eksisting, potensi, serta keterbatasan sumber daya yang ada. Sebagian indikator ditetapkan dengan pola peningkatan gradual, seperti nilai SAKIP, IKM, dan konsolidasi tanah. Sementara itu, indikator yang berhubungan dengan pelayanan dasar dan pengamanan aset tanah didesain dengan pola akseleratif, khususnya pada tahun-tahun akhir periode perencanaan, seiring dengan rencana percepatan penyelesaian backlog perumahan, penanganan kawasan kumuh, dan penyelesaian persoalan pertanahan.

Dengan demikian, indikator kinerja ini tidak hanya menjadi alat ukur keberhasilan Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan, tetapi juga menjadi instrumen akuntabilitas yang dapat

memberikan gambaran capaian pembangunan daerah secara komprehensif.

4.4 Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2025-2029

Indikator Kinerja Kunci (IKK) juga merupakan parameter pengukuran kinerja penyelenggaraan Bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa setiap pemerintah daerah wajib menyusun LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) yang dibuat dalam rangka memberikan laporan pelaksanaan dan gambaran pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. LPPD menggambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh pemerintah daerah, untuk itu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk masing-masing urusan. Pemerintah daerah harus mengisi realisasi capaian dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan tersebut. Dalam menyusun LPPD, kepala daerah wajib menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan sesuai dengan indikator kinerja dalam LPPD. Data yang dituangkan dalam LPPD wajib diverifikasi atau divalidasi oleh Inspektorat dan BPKP daerah yang bersangkutan. Terdapat 14 (empat belas) IKK Outcome yang harus dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan di Tahun 2025 dan 2029 mendatang.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) tersebut menjadi acuan strategis untuk memantau kemajuan pembangunan bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan di Kota Tarakan periode 2025–2030. Melalui pengukuran yang sistematis, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa setiap program yang dijalankan memberi dampak nyata bagi masyarakat dan mendukung pencapaian tujuan RPJMD serta agenda pembangunan nasional.

Pada aspek pelayanan hunian pasca-bencana dan relokasi, indikator persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni dan persentase warga yang terkena relokasi program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitasi rumah layak huni ditargetkan sebesar 100% setiap tahun. Target ini menunjukkan komitmen penuh pemerintah untuk tidak membiarkan korban bencana maupun keluarga yang terkena relokasi tanpa solusi hunian yang memadai. Perhitungan dilakukan dengan membandingkan jumlah penerima manfaat terhadap total rencana penanganan tahunan, dan bobot masing-masing sebesar 20% menegaskan prioritas layanan ini.

Penanganan permukiman kumuh dan rehabilitasi rumah tidak layak huni juga menjadi perhatian utama. Persentase luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 hektare yang ditangani meningkat progresif dari 18,79% pada 2025 hingga mencapai 100% pada 2030. Sementara itu, persentase rumah tidak layak huni (RTLH) yang tertangani tumbuh dari 2,52% menjadi 3,79% pada akhir periode, menunjukkan upaya bertahap untuk mengurangi backlog perumahan. Dalam waktu yang sama, persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) juga naik stabil dari 5,62% menjadi 7,96%, yang berarti semakin banyak lingkungan hunian yang memiliki infrastruktur dasar memadai.

Di bidang pertanahan dan reforma agraria, indikator seperti luas tanah yang ditetapkan sebagai objek landreform, luas tanah potensi TORA, luas tanah ganti kerugian yang ditindaklanjuti redistribusi, dan jumlah subjek penerima redistribusi tanah memegang peranan penting. Meskipun bobotnya berada di kisaran 11–12%, target yang dipatok sebesar 100% setiap tahun menunjukkan kewajiban pemerintah daerah untuk menuntaskan redistribusi tanah demi pemerataan penguasaan dan pemanfaatan sumber daya agraria.

Penataan aset daerah dan konsolidasi tanah juga tercermin dalam persentase hak atas tanah pemerintah daerah yang ditetapkan dan persentase luas lokasi konsolidasi tanah yang mendapat dukungan

pembangunan kewenangan kabupaten/kota. Peningkatan persentase hak atas tanah dari 28,10% menjadi 85,76% sepanjang 2025–2030 mengindikasikan penguatan pengelolaan aset publik dan pengamanan lahan strategis milik pemerintah kota. Konsolidasi tanah yang didukung pembangunan juga naik secara bertahap, menggambarkan kesinambungan antara penataan ruang dan investasi infrastruktur.

Selain itu, indikator lain seperti persentase peta nilai tanah yang dimanfaatkan dalam pelayanan BPHTB, persentase desa atau kelurahan lengkap berkualitas, serta penyelesaian kasus tanah garapan belum bersertipikat melalui mediasi dipatok pada level 100% setiap tahun. Hal ini menegaskan pentingnya transparansi data pertanahan, pelayanan publik yang akuntabel, dan penyelesaian sengketa lahan secara damai.

Secara keseluruhan, tabel IKK ini menunjukkan kerangka kerja pengukuran kinerja yang menyeluruh, meliputi pelayanan sosial-hunian (penanganan bencana, relokasi, RTLH, PSU), penataan ruang dan penguasaan tanah (kumuh, TORA, landreform, konsolidasi tanah, pengamanan aset daerah), serta penguatan tata kelola pertanahan (peta nilai tanah, sengketa tanah, kelurahan lengkap). Kombinasi target bertahap, bobot yang proporsional, dan capaian tahunan yang ambisius memastikan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Tarakan tetap fokus pada peningkatan kualitas layanan publik sekaligus menjaga kesinambungan pembangunan daerah hingga tahun 2030.

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan dan Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Perumahan Rakyat tersaji pada Tabel 4. 4 dan Tabel 4.5 dibawah ini.

Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	T1: Indikator Tujuan 1: Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak terjangkau dan berkelanjutan	Persentase	71.08%	73.51%	75.82%	78.01%	80.11%	82.11%	
2	S1.1: Indikator Sasaran 1: Persentase Permukiman yang Sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persentase	34.00%	38.24%	42.32%	46.26%	50.07%	53.75%	
3	S1.2.1: Nilai SAKIP	Nilai	84,23	84,24	84.26	84.28	84.30	84.40	
4	S1.2.2: IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Indeks	88	88.5	89	89.5	90	90.5	
5	T2: Indikator Tujuan 2: Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah yang mendapat Dukungan Pembangunan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase	39.29%	39.57%	39.71%	39.85%	39.99%	40.13%	
6	S2.1: Indikator Sasaran 2: Persentase Penetapan Hak Atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	Persentase	28.10%	28.80%	30.75%	57.12%	76.12%	85.76%	

Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

N O	IKK	RUMUS		BOBO T	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	$\frac{\text{Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang mendapatkan layanan penyediaan rumah layak huni dan rehabilitasi rumah pada tahun-N}}{\text{Jumlah total rencana warga negara korban bencana kabupaten/kota yang akan ditangani pada tahun-N}}$	$\frac{x}{100\%}$	20%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	$\frac{\text{Jumlah warga negara terkena relokasi program kabupaten/kota yang mendapatkan layanan fasilitas penyediaan rumah layak huni pada tahun-N}}{\text{Jumlah total rencana warga negara terkena relokasi program provinsi yang akan ditangani pada tahun-N}}$	$\frac{x}{100\%}$	20%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
3	Persentase Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	$\frac{\text{Luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani tahun N (Ha)}}{\text{target luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha pada tahun N}}$	$\frac{x}{100\%}$	20%	18.79%	34.36%	50.21%	66.35%	82.76%	100.00 %
4	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	$\frac{\text{jumlah RTLH yang tertangani pada Tahun-N}}{\text{jumlah RTLH pada Tahun-N}}$	$\frac{x}{100\%}$	20%	2.52%	2.78%	3.03%	3.29%	3.54%	3.79%

N O	IKK	RUMUS		BOBO T	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
5	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	$\frac{\text{Realisasi jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan PSU di tahun N}}{\text{Target jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan PSU di tahun N}}$	$\times 100\%$	20%	5.62%	6.10%	6.57%	7.04%	7.66%	7.96%
1	Luas tanah yang ditetapkan menjadi Tanah Objek Landreform dari Tanah Kelebihan maksimum/ Absentee dan jumlah subjek yang ditetapkan pada tahun anggaran	$\frac{\text{Luas realisasi dari target luas tanah yang ditetapkan menjadi Tanah Objek Landreform dari Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee}}{\text{Realisasi dari target jumlah subjek yang ditetapkan}}$	$\times 100\%$	12%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
2	Luas tanah potensi TORA untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah dan jumlah potensi subjek penerima manfaat yang dapat ditindaklanjuti dengan penataan akses melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat pada tahun anggaran	$\frac{\text{luas realisasi dari target luas tanah potensi TORA untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah}}{\text{Target jumlah potensi subjek penerima manfaat yang dapat ditindaklanjuti dengan penataan akses melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat}}$	$\times 100\%$	11%	SURAT PERNY ATAAN	SURAT PERNY ATAAN	SURAT PERNY ATAAN	SURAT PERNY ATAAN	SURAT PERNY ATAAN	SURAT PERNY ATAAN
3	Luas tanah yang ditetapkan ganti kerugian untuk ditindaklanjuti	Luas realisasi tanah yang ditetapkan ganti kerugian untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah.	$\times 100\%$	11%	SURAT PERNY ATAAN	SURAT PERNY ATAAN	SURAT PERNY ATAAN	SURAT PERNY ATAAN	SURAT PERNY ATAAN	SURAT PERNY ATAAN

N O	IKK	RUMUS		BOBO T	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
	kegiatan redistribusi tanah pada tahun anggaran	target luas tanah yang ditetapkan ganti kerugian untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah								
4	Jumlah subjek penerima tanah yang ditetapkan sebagai subjek redistribusi tanah dan persentase realisasi dari target luas objek redistribusi yang difasilitasi dalam rangka penetapan objek redistribusi tanah dalam tahun anggaran	$\frac{\text{realisasi jumlah subjek penerima tanah yang ditetapkan sebagai subjek redistribusi tanah dan persentase realisasi dari target luas objek redistribusi tanah yang difasilitasi dalam rangka penetapan objek redistribusi tanah}}{\text{target jumlah subjek penerima tanah yang ditetapkan sebagai subjek redistribusi tanah dan persentase realisasi dari target luas objek redistribusi tanah yang difasilitasi dalam rangka penetapan objek redistribusi tanah}} \times 100\%$	11%		SURAT PERNY ATAAN	SURAT PERNY ATAAN	SURAT PERNY ATAAN	SURAT PERNY ATAAN	SURAT PERNY ATAAN	SURAT PERNY ATAAN
5	Terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertipikat yang dilakukan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah kasus tanah garapan belum bersertipikat yang ditangani}}{\text{Jumlah pengaduan kasus tanah garapan belum bersertipikat}} \times 100\%$	11%		100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
6	Terpetakannya seluruh bidang tanah dalam satu desa atau kelurahan lengkap secara berkualitas	$\frac{\text{Jumlah desa atau kelurahan lengkap berkualitas}}{\text{Jumlah desa atau kelurahan dalam satu kabupaten atau kota}} \times 100\%$	11%		SURAT PERNY ATAAN	SURAT PERNY ATAAN	SURAT PERNY ATAAN	SURAT PERNY ATAAN	SURAT PERNY ATAAN	SURAT PERNY ATAAN

N O	IKK	RUMUS		BOBO T	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
7	Ditetapkannya Hak Atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	$\frac{\text{Luas Tanah yang telah bersertipikat dalam penguasaan Pemerintah Daerah}}{\text{Luas seluruh tanah yang masuk dalam aset Pemerintah Daerah}}$	$\times 100\%$	11%	28.10%	28.80%	30.75%	57.12%	76.12%	85.76%
8	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah yang mendapat Dukungan Pembangunan Kewenangan Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Luas Lokasi Konsolidasi Tanah yang mendapat Dukungan Pembangunan Kewenangan Kabupaten/Kota}}{\text{Luas Lokasi Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota}}$	$\times 100\%$	11%	39.29%	39.57%	39.71%	39.85%	39.99%	40.13%
9	Persentase Luas Peta Nilai Tanah yang telah dimanfaatkan dalam pelayanan BPHTB	$\frac{\text{Luas Peta Nilai Tanah yang telah dikerjasamakan untuk dimanfaatkan dalam pelayanan BPHTB}}{\text{Luas Peta Nilai Tanah pada wilayah Kabupaten/Kota}}$	$\times 100\%$	11%	SURAT PERNY ATAAN	SURAT PERNY ATAAN	SURAT PERNY ATAAN	SURAT PERNY ATAAN	SURAT PERNY ATAAN	SURAT PERNY ATAAN

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Tarakan Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan yang memadukan arah kebijakan nasional, provinsi, dan kondisi faktual Kota Tarakan. Dokumen ini menegaskan komitmen Pemerintah Kota Tarakan untuk mewujudkan hunian layak, terjangkau, berkelanjutan, serta penataan kawasan permukiman yang tertib, aman, dan tangguh bencana.

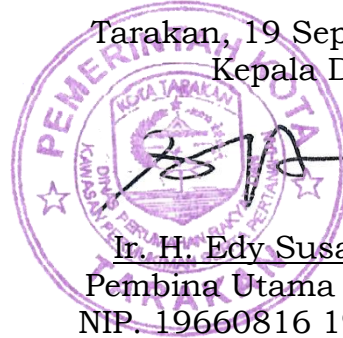
Penyusunan Renstra ini telah mempertimbangkan dinamika lingkungan strategis global, nasional, dan regional, termasuk tantangan perubahan iklim, urbanisasi pesisir, ketimpangan keterjangkauan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), serta tuntutan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perumahan dan kawasan permukiman. Selain itu, analisis potensi daerah mulai dari optimalisasi pemanfaatan aset lahan, peluang pembangunan Rusunawa, penguatan PSU, hingga penanganan rumah bencana menjadi dasar untuk menyusun program dan kegiatan yang responsif, efektif, dan berkelanjutan.

Melalui Renstra ini, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan bertekad meningkatkan mutu pelayanan publik, memperkuat tata kelola pertanahan yang adil dan akuntabel, serta mendorong inovasi berbasis digital dan kemitraan multipihak. Dengan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, masyarakat, dan sektor swasta, diharapkan dalam lima tahun ke depan Kota Tarakan mampu mengurangi backlog perumahan, memperluas akses PSU, menata kawasan kumuh, serta memastikan penanganan hunian pascabencana yang cepat dan tepat.

Renstra ini bukanlah dokumen statis, tetapi pedoman dinamis yang dapat disesuaikan dengan perkembangan kebijakan, kondisi sosial-ekonomi, dan kebutuhan masyarakat. Dengan komitmen, transparansi, dan kolaborasi

yang kuat, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan optimistis bahwa visi “Hunian Layak, Terjangkau, dan Permukiman Berkelanjutan Menuju Tarakan Maju” dapat terwujud, memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan warga Kota Tarakan.

Tarakan, 19 September 2025
Kepala Dinas,



Ir. H. Edy Susanto, M. Si
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19660816 199803 1 005